



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

APBN KITA

KINERJA DAN FAKTA

Kinerja APBN 2024 Tetap Kuat dan Adaptif Mengantisipasi Risiko

FEBRUARI | 2024

Foto:
Storypost - M. Ryan Sasmika

Foto: Storypost

Scan dan Unduh
APBN KITA



ISSN link
APBN KITA



“Kinerja APBN yang tetap positif di awal tahun ini menjadi modal baik bagi kita untuk menjalani tahun 2024.”

Sri Mulyani Indrawati



Diterbitkan oleh: Kementerian Keuangan Republik Indonesia. **Pelindung:** Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan. **Pengarah:** Pimpinan Unit Eselon I Kemenkeu **Penanggung Jawab:** Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku Sekretaris Komite Asset-Liability Committee Kementerian Keuangan. **Pemimpin Redaksi:** Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro. **Dewan Redaksi:** Tim Deputies Asset-Liability Committee Kementerian Keuangan. **Tim Redaksi:** Tim Teknis Asset-Liability Committee Kementerian Keuangan, Tim Redaksi Penyusun Publikasi APBN KiTa. **Editor:** Tim Editor Penyusun Publikasi APBN KiTa **Desain Grafis, Layout dan Foto:** Biro KLI Kementerian Keuangan. Alamat Redaksi: Gedung Frans Seda Lantai 8, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta.



Daftar Isi

RINGKASAN EKSEKUTIF	7
PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO	13
POSTUR APBN	17
Penerimaan Perpajakan	21
Penerimaan Kepabeanan & Cukai	27
Penerimaan Negara Bukan Pajak	33
Belanja Pemerintah Pusat	37
Transfer ke Daerah	43
Pembiayaan Utang	49
<i>Calendar Event 2024</i>	56
Pustaka Literasi	59
1. Dasar-Dasar Praktek Penyusunan APBN di Indonesia	
2. Postur APBN indonesia	
3. Informasi APBN 2024	
Laporan Khusus	60

Penerimaan Pajak	149,25
Penerimaan Bea & Cukai	22,91
Penerimaan Negara Bukan Pajak	43,26
Penerimaan Hibah	
Belanja Kementerian/Lembaga	44,76
Belanja Non Kementerian/Lembaga	51,63
Transfer ke Daerah	87,78

Penerimaan Pajak 149,25

Penerimaan Bea & Cukai 22,91

Penerimaan Negara Bukan Pajak 43,26

Penerimaan Hibah

Belanja Kementerian/Lembaga 44,76

Belanja Non Kementerian/Lembaga 51,63

Transfer ke Daerah 87,78

Dalam Triliun Rupiah

Ringkasan Eksekutif

Prospek perekonomian global memperlihatkan penguatan yang moderat. *International Monetary Fund* (IMF) merevisi ekonomi global 2024 tumbuh 3,1 persen (yoy), lebih tinggi 0,2 persen dibandingkan proyeksi sebelumnya. Proyeksi tersebut didorong oleh resiliensi perekonomian Amerika Serikat, negara-negara *emerging markets* dan *developing economies* (EMDEs), serta ekspansi fiskal Pemerintah Tiongkok. Di sisi lain, rata-rata inflasi global diproyeksi turun dari 6,8 persen di 2023 menjadi 5,8 persen di 2024, meskipun masih dibayangi risiko disrupsi rantai pasok karena faktor geopolitik. Di sisi domestik, perkembangan ekonomi nasional masih tetap kuat dan stabilitas ekonomi tetap terjaga. Pelaksanaan pemilihan presiden dan pemilihan



**Memasuki awal 2024,
realisasi Pendapatan
Negara dan Hibah
hingga 31 Januari 2024
tercatat Rp215,46 triliun
atau telah mencapai
7,70 persen dari
target APBN 2024.**

legislatif yang berjalan tertib dan aman mendukung aktivitas dan stabilitas ekonomi ke depan.

Perpajakan

Memasuki awal 2024, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah hingga 31 Januari 2024 tercatat Rp215,46 triliun atau telah mencapai 7,70 persen dari target APBN 2024¹. Secara nominal, realisasi komponen Pendapatan Negara yang bersumber dari penerimaan Perpajakan mencapai Rp172,16 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp43,26 triliun, dan realisasi Hibah mencapai Rp0,05 triliun. Tren capaian masing-masing komponen Pendapatan Negara tersebut mencapai 7,46 persen dan 8,79 persen dari target.

Realisasi penerimaan Perpajakan bersumber dari penerimaan Pajak serta Kepabeanan dan Cukai. Hingga akhir Januari 2024 capaian penerimaan Pajak tercatat Rp149,25 triliun dan Kepabeanan dan Cukai Rp22,91 triliun. Sementara itu, realisasi penerimaan Pajak dan Kepabeanan dan Cukai tersebut masing-masing telah mencapai 7,50 persen dan 7,14 persen terhadap target. Kinerja perpajakan dipengaruhi oleh faktor fluktuasi harga komoditas yang cenderung menurun, dampak peningkatan restitusi pada penerimaan pajak, dan tingginya basis penerimaan pada bulan Januari 2023.

Penerimaan Pajak terutama berasal dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) Nonmigas Rp83,69 triliun dan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN/PPnBM) Rp57,76 triliun. Kontribusi kedua komponen penerimaan Pajak tersebut terhadap total penerimaan Pajak masing-masing 56,07 persen dan 38,70 persen. Secara lebih detil, penerimaan

PPH Nonmigas masih ditopang oleh tiga komponen terbesar yang bersumber dari PPh Pasal 21, PPh Pasal 25/29 Badan, dan PPh Final, dimana kontribusi ketiganya mencapai 69,20 persen terhadap total penerimaan PPh Nonmigas.

Berdasarkan trennya, PPh 21 menunjukkan tren positif yang mencerminkan peningkatan utilisasi tenaga kerja dan perbaikan gaji/upah. Tren positif juga ditunjukkan oleh PPh Badan yang menandakan peningkatan kinerja keuangan perusahaan. Realisasi penerimaan Pajak dari komponen PPN/PPnBM terutama ditopang oleh penerimaan PPN, khususnya PPN Dalam Negeri (PPN DN) dan PPN Impor dengan kontribusi dari kedua komponen tersebut masing-masing 61,69 persen dan 33,85 persen terhadap total penerimaan PPN/PPnBM. Penerimaan PPN DN dan Impor menunjukkan tren positif yang mengindikasikan kuatnya konsumsi dalam negeri dan resiliennya ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.

Capaian realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai terdiri atas penerimaan Cukai Rp17,89 triliun, Bea Masuk (BM) Rp3,85 triliun, dan Bea Keluar (BK) Rp1,16 triliun. Penerimaan Kepabeanan dan Cukai terutama didukung oleh penerimaan dari Cukai, khususnya Cukai Hasil Tembakau (CHT) dengan kontribusi mencapai 75,85 persen terhadap total penerimaan Kepabeanan dan Cukai. Jika dilihat berdasarkan persentase terhadap target APBN 2024, penerimaan Cukai mencapai 7,27 persen, Bea Masuk 6,72 persen, dan Bea Keluar 6,63 persen, sejalan dengan pola realisasi tahun-tahun sebelumnya.

1. Persentase terhadap target dan pagu mengacu pada APBN 2024

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Realisasi PNBP sampai dengan akhir Januari 2024 mencapai Rp43,26 triliun (8,79 persen terhadap target). Peningkatan capaian realisasi tersebut bersumber dari seluruh jenis realisasi PNBP, terlebih PNBP Kekayaan Negara Negara (KND) dan PNBP Badan Layanan Umum (BLU).

Secara lebih rinci, realisasi Pendapatan Sumber Daya Alam (SDA) mencapai Rp18,96 triliun. Capaian tersebut bersumber dari kinerja SDA Migas yang sedikit melambat 19,93 persen akibat penurunan harga minyak mentah (ICP). Sedangkan SDA Nonmigas tumbuh 23,90 persen.

PNBP yang berasal dari KND tumbuh signifikan di Januari 2024 dengan capaian Rp6,77 triliun, PNBP Lainnya Rp15,85 triliun, dan Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) Rp1,67 triliun. Capaian positif PNBP KND terutama didorong oleh setoran dividen interim BUMN Perbankan. Selanjutnya, kontributor utama PNBP Lainnya dari PNBP K/L. Adapun capaian Pendapatan BLU terutama berasal dari Pendapatan Jasa Rumah Sakit.

Belanja Negara

Realisasi Belanja Negara sampai dengan akhir Januari 2024 mencapai Rp184,17 triliun (5,54 persen dari pagu). Realisasi Belanja Negara tersebut meliputi realisasi Belanja Pemerintah Pusat Rp96,39 triliun dan Transfer ke Daerah Rp87,78 triliun. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat periode ini lebih tinggi terutama dipengaruhi realisasi Bantuan Sosial Rp10,44 triliun dan Belanja Barang yang mencapai Rp12,98 triliun. Selain itu, peningkatan realisasi Belanja Bantuan Sosial terutama untuk membantu

masyarakat dalam menghadapi ketidakstabilan harga pangan akibat gejolak ekonomi global.

Subsidi

Alokasi Belanja Subsidi untuk 2024 mencapai Rp285,97 triliun, yang terdiri atas alokasi Subsidi Energi Rp189,10 triliun dan Subsidi Nonenergi Rp96,87 triliun. Alokasi tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan daya saing dan produktivitas pada sektor ekonomi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sampai dengan akhir Januari 2024, realisasi Belanja Subsidi mencapai Rp200 miliar yang merupakan bagian dari realisasi Belanja Subsidi Nonenergi, yaitu Subsidi Belanja Kredit Program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Transfer Ke Daerah

Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) sampai dengan 31 Januari 2024 mencapai Rp87,78 triliun atau 10,24 persen dari pagu. Realisasi TKD lebih tinggi Rp29,59 triliun. Peningkatan realisasi TKD yang signifikan tersebut terutama didorong oleh realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik yang telah disalurkan Rp27,53 triliun sejalan dengan penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp24,9 triliun.

Secara lebih rinci, jenis TKD lain yang mengalami peningkatan realisasi yaitu Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Desa. Dana Bagi Hasil terealisasi Rp1,91 triliun seiring dengan peningkatan kepatuhan pemerintahan desa dalam memenuhi syarat salur. Realisasi DAU Rp45,15 triliun, lebih rendah Rp2,22 triliun karena penyaluran DAU yang ditentukan penggunaannya paling cepat dilaksanakan bulan Februari. Sementara itu, jenis dana TKD lainnya

belum mencatatkan realisasi karena pemerintah daerah masih berproses dalam penyusunan Perda APBD dan pemenuhan syarat untuk penyaluran tahap I.

Pembiayaan

Kesinambungan fiskal awal 2024 terjaga dengan baik. Sampai akhir Januari 2024, terdapat surplus anggaran Rp31,29 triliun (0,14 persen dari PDB). Realisasi surplus tersebut disebabkan oleh Pendapatan Negara dan Hibah di awal 2024 mencapai Rp215,46 triliun, sedangkan Belanja Negara mencapai Rp184,17 triliun. Sementara itu, realisasi Pembiayaan Anggaran hingga akhir Januari 2024 mencapai Rp106,40 triliun (20,35 persen terhadap pagu). Realisasi Pembiayaan tersebut didominasi oleh Pembiayaan Utang Rp107,56 triliun yang terdiri atas realisasi Surat Berharga Negara (Neto) Rp111,30 triliun dan Pinjaman (Neto) negatif Rp3,74 triliun yang berasal dari Pinjaman Luar Negeri (Neto). Di samping Pembiayaan Utang, pemerintah juga memperoleh Penerimaan Kembali Investasi Rp559,90 miliar pada pos Pembiayaan Investasi. Pemerintah juga memberikan Pinjaman Rp1,80 miliar dan merealisasikan anggaran untuk Pembiayaan Lainnya Rp14,10 miliar.

Halaman Ini Dikосongkan



**Kinerja Pertumbuhan
Ekonomi Nasional
Diperkirakan Terus
Berlanjut dan Lebih
Kuat di 2024**

Perkembangan Ekonomi Makro

Ekonomi nasional triwulan IV 2023 tumbuh 5,04 persen (yoy), sehingga secara keseluruhan ekonomi Indonesia tumbuh 5,05 persen (yoy). Pertumbuhan tersebut, dari sisi pengeluaran didukung oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga 4,82 persen (yoy) dan sektor manufaktur yang tumbuh 4,64 persen (yoy) dari sisi produksi. Semua wilayah di Indonesia mencatatkan pertumbuhan positif dengan tingkat pertumbuhan yang beragam. Kinerja pertumbuhan ekonomi nasional di 2023 tersebut diperkirakan akan terus berlanjut dan lebih kuat di 2024. Perkembangan *leading indicators* (indikator penentu) yakni *Purchasing Managers' Index* (PMI) Manufaktur dan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) di awal 2024 terus menguat dengan capaian masing-



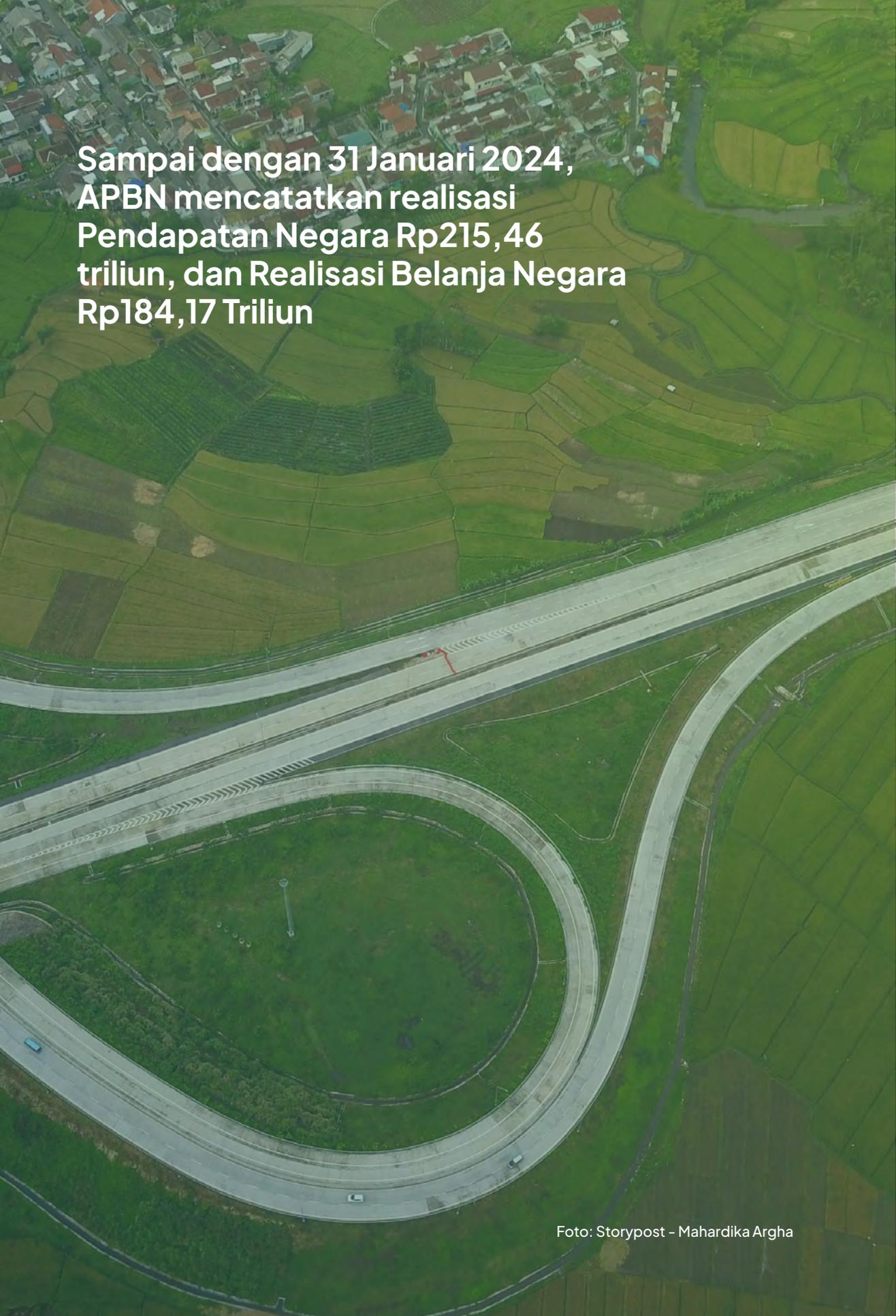
Capaian indeks tersebut menunjukkan ekspansi aktivitas manufaktur yang lebih tinggi dari periode sebelumnya dan optimisme konsumen terhadap prospek ekonomi kedepan tetap kuat.

masing 52,9 (Desember 2023: 52,2) dan 125,0 (Desember 2023: 123,8). Capaian indeks tersebut menunjukkan ekspansi aktivitas manufaktur yang lebih tinggi dari periode sebelumnya dan optimisme konsumen terhadap prospek ekonomi kedepan tetap kuat. Pemerintah tetap mewaspadai terhadap ketidakpastian perkembangan ekonomi global.

Stabilitas perkembangan pasar keuangan nasional tetap terjaga di awal 2024. Pasar saham domestik masih tetap kuat dimana IHSG tercatat pada level 7.295,10 pada 23 Februari 2024. Pergerakan nilai tukar Rupiah di awal tahun mengalami tekanan dan mengacu pada Kurs Tengah Transaksi Bank Indonesia tercatat Rp15.630 per USD pada 23 Februari 2024. Rata-rata nilai tukar Rupiah tercatat Rp15.630 per USD hingga 23 Februari 2024, atau terdepresiasi 1,24 persen dibandingkan posisi nilai tukar Rupiah di awal 2024. Inflasi Januari 2024 tercatat 2,57 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan Desember 2023: 2,61 persen (yoy) yang didorong oleh perlambatan inflasi inti. Harga pangan pokok khususnya komoditas beras masih meningkat di Januari 2024. Posisi cadangan devisa nasional terus berada pada posisi yang kuat dalam menopang daya tahan ekonomi nasional terhadap guncangan eksternal. Posisi cadangan devisa Indonesia per akhir Januari 2024 tercatat USD145,1 miliar.

Jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Indonesia selama 2023 meningkat secara drastis dibandingkan 2022. Selama 2023, wisatawan yang berkunjung ke Indonesia tercatat 11,68 juta wisatawan, lebih tinggi dari kunjungan 2022 yang tercatat 5,89 juta wisatawan. Kondisi ini mendukung aktivitas pariwisata nasional dan secara langsung berdampak positif terhadap perkembangan sektor terkait lainnya. Sektor yang terkait dengan aktivitas pariwisata secara langsung adalah sektor makanan dan akomodasi, hotel, transportasi, serta perdagangan. Pada Desember 2023, wisman yang berkunjung ke Indonesia didominasi oleh wisman yang berasal dari Malaysia (18,45 persen), Singapura (16,41 persen), dan Australia (11,87 persen). Sementara itu, kondisi Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel klasifikasi bintang di Indonesia pada Desember 2023 tercatat 59,74 persen, dengan laju positif.

Halaman Ini Dikосongkan

An aerial photograph showing a multi-lane highway interchange with several curved ramps. The surrounding landscape is a mix of green agricultural fields and a small cluster of buildings with red roofs in the upper left corner. The text is overlaid in the top left area.

**Sampai dengan 31 Januari 2024,
APBN mencatatkan realisasi
Pendapatan Negara Rp215,46
triliun, dan Realisasi Belanja Negara
Rp184,17 Triliun**

Postur APBN

Sampai dengan 31 Januari 2024, APBN mencatatkan realisasi Pendapatan Negara Rp215,46 triliun, dan realisasi Belanja Negara Rp184,17 triliun.

Realisasi Pendapatan Negara mencapai 7,69 persen dari target, antara lain terdiri atas:

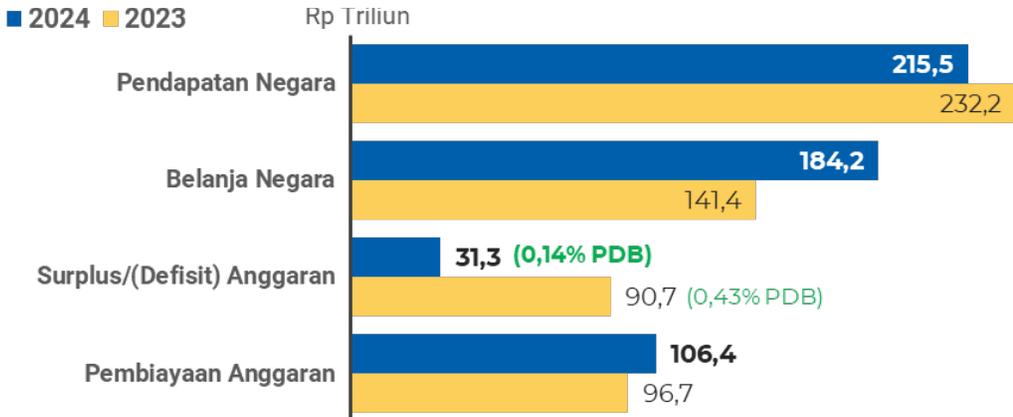
Realisasi Penerimaan Perpajakan Rp172,16 triliun atau 7,45 persen dari target, terdiri atas Penerimaan Pajak Rp149,25 triliun (7,50 persen dari target) serta Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Rp22,91 triliun (7,14 persen dari target).

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp43,26 triliun atau 8,79 persen dari target. Realisasi Belanja Negara telah mencapai 5,54 persen dari pagu, terdiri atas:



APBN mencatatkan realisasi Pendapatan Negara Rp215,46 triliun dan realisasi Belanja Negara Rp184,17 triliun.

Realisasi APBN s.d. 31 Januari 2024



Perkembangan Surplus/Defisit dan Keseimbangan Primer





Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan Belanja Negara tersebut, sampai dengan 31 Januari 2024, surplus APBN mencapai Rp31,29 triliun atau 0,14 persen terhadap PDB

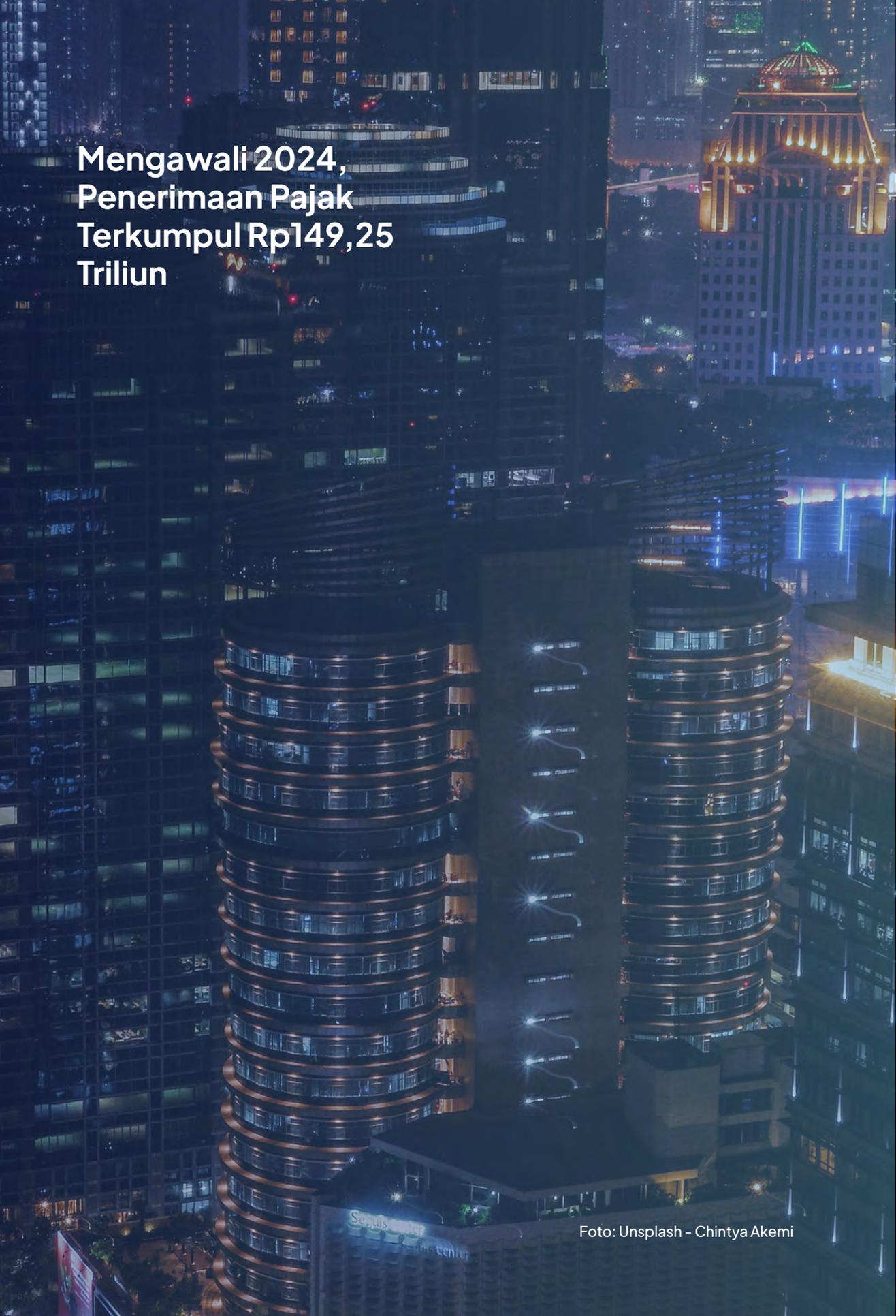
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Rp96,39 triliun (3,91 persen dari pagu). Realisasi tersebut terdiri atas realisasi Belanja K/L Rp44,76 triliun (4,10 persen dari pagu) serta realisasi Belanja nonK/L Rp51,63 triliun (3,75 persen dari pagu).

Realisasi Transfer ke Daerah Rp87,78 triliun (10,24 persen dari alokasi).

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan Belanja Negara tersebut, sampai dengan 31 Januari 2024, surplus APBN mencapai Rp31,29 triliun atau 0,14 persen terhadap PDB (periode yang sama 2023 surplus mencapai Rp90,75 triliun atau 0,43 persen terhadap PDB) dan keseimbangan primer juga mengalami surplus Rp61,42 triliun. Sementara itu, realisasi pembiayaan anggaran telah mencapai Rp106,40 triliun (20,35 persen dari target).

Realisasi APBN s.d. 31 Januari 2023 –2024

APBN (triliun rupiah)	2023			2024		
	Perpres 75/2023	Realisasi s.d. 31 Januari	% thd Perpres 75/2023	APBN	Realisasi s.d. 31 Januari	% thd APBN
A. Pendapatan Negara	2.637,25	232,17	8,80	2.802,29	215,46	7,69
I. Pendapatan Dalam Negeri	2.634,15	232,17	8,81	2.801,86	215,42	7,69
1. Penerimaan Perpajakan	2.118,35	186,43	8,80	2.309,86	172,16	7,45
a. Pajak	1.818,24	162,32	8,93	1.988,88	149,25	7,50
b. Kepabeanan dan Cukai	300,11	24,11	8,03	320,98	22,91	7,14
2. PNBP	515,80	45,73	8,87	492,00	43,26	8,79
II. Penerimaan Hibah	3,10	0,00	0,14	0,43	0,05	10,86
B. Belanja Negara	3.117,18	141,42	4,54	3.325,12	184,17	5,54
I. Belanja Pemerintah Pusat	2.302,46	83,24	3,62	2.467,53	96,39	3,91
1. Belanja K/L	1.000,84	28,74	2,87	1.090,83	44,76	4,10
2. Belanja Non K/L	1.301,61	54,50	4,19	1.376,70	51,63	3,75
II. Transfer Ke Daerah	814,72	58,19	7,14	857,59	87,78	10,24
C. Keseimbangan Primer	(38,53)	113,89	(295,61)	(25,51)	61,42	(240,82)
D. Surplus/(Defisit) Anggaran	(479,93)	90,75	(18,91)	(522,83)	31,29	(5,99)
% Surplus/(Defisit) thd PDB	(2,27)	0,43		(2,29)	0,14	
E. Pembiayaan Anggaran	479,93	96,73	20,16	522,83	106,40	20,35

A nighttime photograph of a city skyline. The foreground is dominated by two tall, cylindrical skyscrapers with a distinctive design of horizontal, glowing bands around their facades. The windows of these buildings are lit up, and some have external lighting. In the background, other skyscrapers are visible, some with bright, colorful lights. The sky is dark, and the overall atmosphere is one of a bustling, modern city at night.

**Mengawali 2024,
Penerimaan Pajak
Terkumpul Rp149,25
Triliun**

Foto: Unsplash - Chintya Akemi

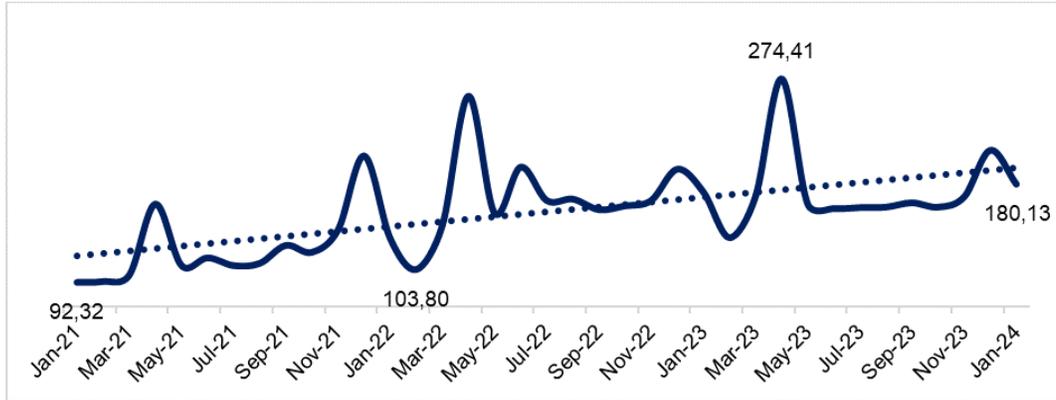
Penerimaan Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menghadapi target 2024 yang lebih menantang. Target penerimaan pajak pada APBN 2024 melonjak 6,48 persen, lebih tinggi dari realisasi penerimaan pajak 2023. Secara nominal, DJP mesti mengumpulkan Rp1.988,88 triliun sampai dengan 31 Desember 2024. Untuk memenuhi tantangan tersebut, berbagai upaya dan strategi akan dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pengawasan kepada wajib pajak. Upaya dan strategi sebagaimana dimaksud meliputi perbaikan sistem perpajakan, perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta penguatan komunikasi dengan wajib pajak dan *stakeholders*.



Target penerimaan pajak pada APBN 2024 melonjak 9,38 persen, lebih tinggi dari realisasi penerimaan pajak 2023.

Grafik Tren Total Penerimaan Pajak Bruto



Sampai dengan 31 Januari 2024, realisasi penerimaan pajak tercatat Rp149,25 triliun. Angka ini setara dengan 7,50 persen dari target APBN 2024. Kelompok pajak penghasilan khususnya PPh Nonmigas menjadi penyumbang penerimaan terbesar. Realisasi penerimaan PPh Nonmigas Januari 2024 berkontribusi 56,07 persen dari total penerimaan, setara dengan Rp83,69 triliun atau 7,87 persen dari target. Penerimaan kelompok pajak atas konsumsi, PPN dan PPnBM terhimpun Rp57,76 triliun atau 7,12 persen dari target. Sementara itu, PPh Migas dengan capaian target penerimaan tertinggi di bulan ini memperoleh Rp6,99 triliun atau 9,15 persen dari target. Terakhir, penerimaan yang berasal dari PBB dan Pajak Lainnya yaitu Rp0,81 triliun atau 2,14 persen dari target.

Berdasarkan penerimaan bruto, sejak awal 2021 sampai dengan Januari 2024 penerimaan pajak menunjukkan tren kenaikan. Penerimaan pajak bruto yang diperoleh pada Januari 2024 lebih tinggi dari penerimaan tahunan sebelumnya. Bahkan, hampir dua kali lebih besar dari perolehan

pada periode yang sama di 2021. Hal ini menggambarkan kinerja penerimaan pajak masih cukup positif pada Januari 2024.

Tren Penerimaan Pajak Berdasarkan Aktivitas Kegiatan Ekonomi dan Kinerja Kegiatan Usaha Masih Menunjukkan Kinerja Positif

Penerimaan bruto PPN Dalam Negeri dan PPN Impor memperlihatkan tren positif pada periode Januari 2021 sampai dengan 2024. PPN Dalam Negeri sendiri mengalami kenaikan yang cukup signifikan dalam periode tersebut. Sementara itu, PPN Impor mengalami kenaikan yang cenderung *flat* karena terpengaruh oleh pelemahan kinerja impor. Kinerja positif PPN Dalam Negeri dan PPN Impor menjadi indikasi konsumsi dalam negeri yang kuat dan resiliensi ekonomi Indonesia.

Selanjutnya, PPh Badan mengalami tren positif atas setoran masanya. Kondisi tersebut mencerminkan peningkatan kinerja keuangan korporasi. Sejalan dengan PPh Badan, pajak atas karyawan atau PPh Pasal 21 juga mengalami



Penerimaan pajak Januari 2024 didominasi oleh Sektor Perdagangan dan Sektor Industri Pengolahan. Kedua sektor ini berperan 52,8 persen terhadap total penerimaan pajak.

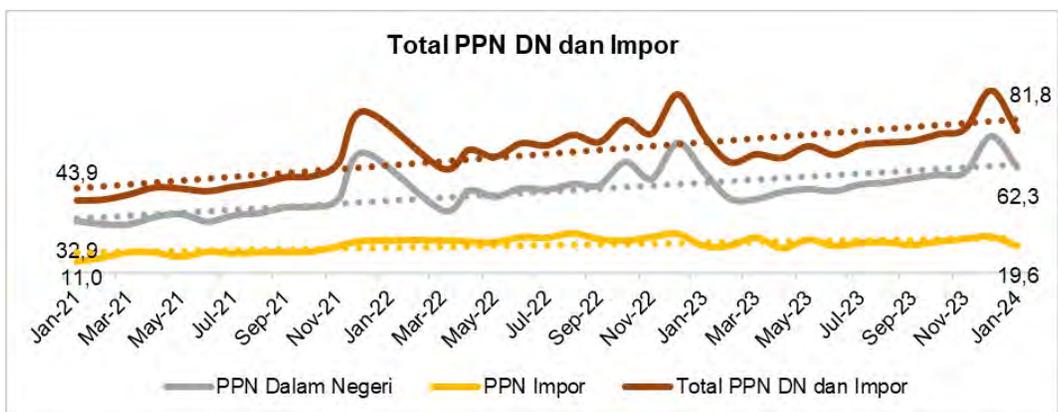
pertumbuhan. Bahkan, pada Januari 2024 penerimaannya meningkat tajam dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. PPh Pasal 21 yang kuat merupakan dampak penyerapan tenaga kerja, serta perbaikan upah/gaji yang terjaga.

PPN, PPh Pasal 21, dan PPh Badan Penopang Penerimaan Pajak

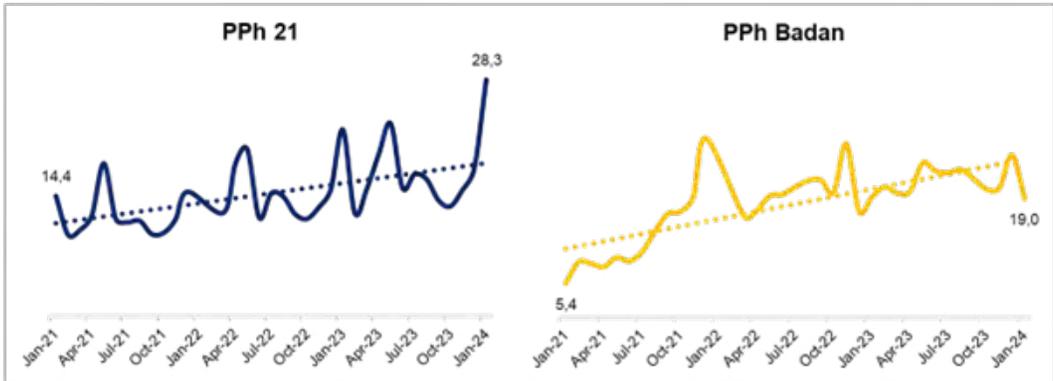
Penerimaan pajak sepanjang Januari 2024 ditopang oleh realisasi PPN Dalam Negeri, PPN Impor, PPh Pasal 21, dan PPh Badan. Porsi penerimaan jenis pajak tersebut mencapai 68,09 persen terhadap total penerimaan pajak di Januari 2024. Secara lebih rinci, realisasi bersih PPN Dalam Negeri tercatat Rp35,64 triliun atau 23,88 persen dari total penerimaan pajak. Peningkatan PPN Dalam Negeri didorong oleh setoran Desember 2023 dari wajib pajak yang bergerak di sektor perdagangan. Aktivitas ekonomi Desember meningkat seiring dengan perayaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru.

Realisasi PPh Pasal 21 mencapai Rp28,25 triliun atau 18,93 persen dari total penerimaan pajak. Kenaikan setoran PPh Pasal 21 pada bulan ini terjadi di semua sektor usaha. Penyerapan tenaga kerja serta perbaikan upah/gaji yang terjaga sejak tahun lalu berdampak pada kinerja penerimaan PPh Pasal 21. Terlebih lagi, pembayaran bonus akhir tahun turut meningkatkan setoran bulan ini.

Tren Penerimaan Bruto PPN, PPh Pasal 21, dan PPh Badan



Tren Penerimaan PPh Pasal 21, dan PPh Badan



Selanjutnya, kinerja PPN Impor mencapai Rp19,56 triliun atau 13,10 persen dari total penerimaan pajak. Capaian penerimaan PPN Impor dipengaruhi oleh perlambatan kinerja impor.

Terakhir, PPh Badan mencatatkan realisasi Rp18,19 triliun atau 12,19 persen dari total penerimaan pajak. Kinerja ekonomi domestik turut mempengaruhi kinerja penerimaan PPh Badan.

Sektor Perdagangan dan Sektor Industri Pengolahan Penyumbang Terbesar dalam Penerimaan Pajak

Dari sisi sektor usaha, penerimaan pajak Januari 2024 didominasi oleh Sektor Perdagangan dan Sektor Industri Pengolahan. Kedua sektor ini berperan 52,8 persen terhadap total penerimaan pajak. Kinerja penerimaan pajak Sektor Industri Pengolahan mencapai Rp38,14 triliun, sedangkan Sektor Perdagangan mencapai Rp38,75 triliun. Kinerja kedua sektor tersebut dipengaruhi oleh kondisi ekonomi domestik, moderasi harga komoditas, serta kinerja impor.

Sektor dengan kontribusi terbesar ketiga, Sektor Jasa Keuangan berhasil mengumpulkan penerimaan pajak Rp18,5 triliun atau 12,7 persen dari total penerimaan pajak Januari 2024. Stabilitas Sektor Jasa Keuangan nasional yang terjaga mendorong penerimaan pajak sektoral tumbuh positif. Hingga akhir tahun 2023 penyaluran kredit perbankan mengalami kenaikan 10,38 persen (yoy) dan laba Bank Umum masih tumbuh *double digits*.

Kemudian, sektor dengan kontribusi sekitar lima persen di bulan ini yaitu Sektor Konstruksi dan *Real Estate*, Sektor Transportasi dan Pergudangan, serta Sektor Pertambangan.

Penerimaan pajak Sektor Konstruksi dan *Real Estate* terealisasi Rp8,4 triliun yang dipengaruhi oleh perkembangan sektor properti. Realisasi penerimaan Sektor Transportasi dan Pergudangan yaitu Rp7,5 triliun. Kinerja sektor tersebut dipengaruhi oleh peningkatan mobilitas masyarakat pada semua moda transportasi serta kebangkitan jasa pergudangan dan penunjang angkutan.

**Grafik Realisasi Penerimaan Pajak
Berdasarkan Jenis Pajak dan Sektor**



Serupa dengan penerimaan pajak Sektor Transportasi dan Pergudangan, realisasi Sektor Pertambangan mencapai Rp7,5 triliun yang masih dimoderasi oleh harga komoditas.

**Neraca Perdagangan
Nasional Januari 2024
Tercatat Surplus
USD2,02 Miliar**



Penerimaan Kepabeanaan & Cukai

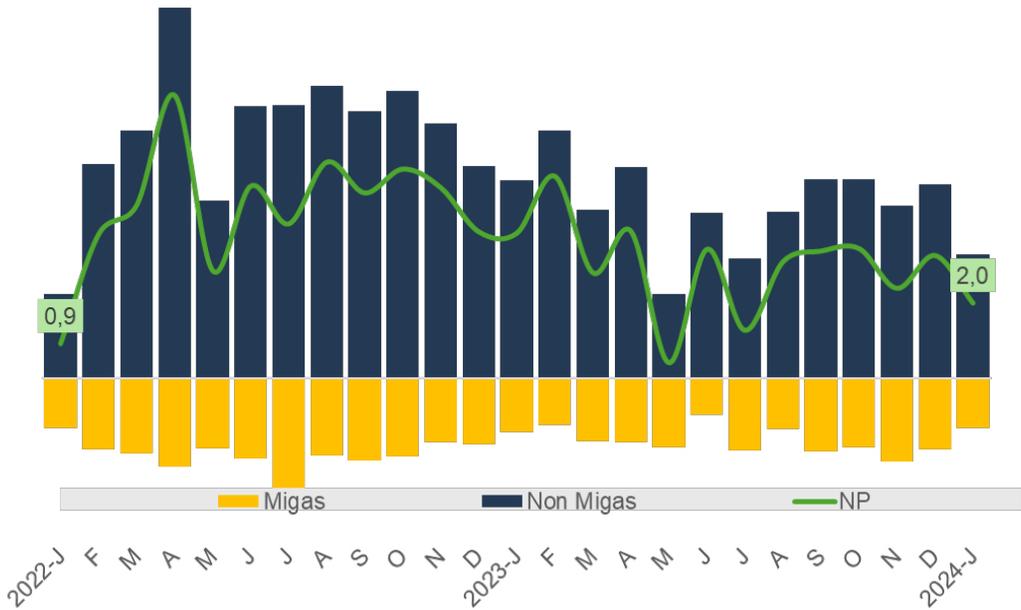
Awal 2024 dibuka dengan kinerja positif pada neraca perdagangan, dengan surplus yang tercatat USD2,02 miliar pada Januari 2024. Surplus ini memberikan dampak positif pada cadangan devisa dan masih melanjutkan tren positif yang telah terjadi sejak Mei 2020. Untuk menjaga keberlanjutan tren positif ini, kinerja perdagangan internasional perlu terus dipantau dan dikawal.

Surplus neraca utamanya terjadi pada Nonmigas sedangkan Migas masih defisit. Kinerja positif neraca Nonmigas didukung oleh komoditas SDA seperti batubara dan minyak goreng kelapa sawit. Selain itu, sektor manufaktur terutama logam dasar seperti besi, baja dan logam lainnya juga memberikan kontribusi penting dalam menciptakan



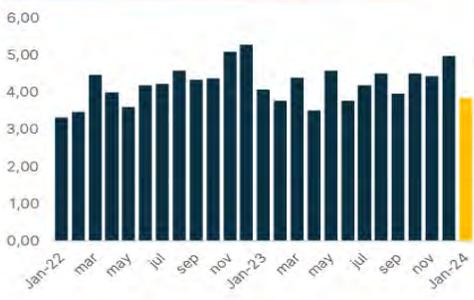
**Perubahan Kinerja
positif neraca Nonmigas
didukung oleh
komoditas SDA seperti
batubara dan minyak
goreng kelapa sawit.**

Grafik Neraca Perdagangan Indonesia 2020–2023

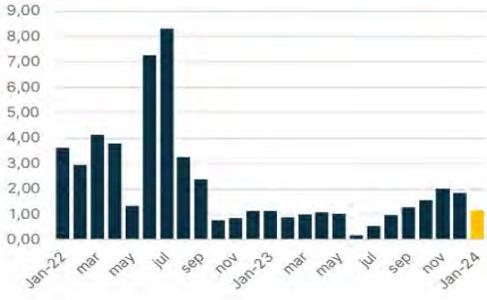


Realisasi Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai (dalam triliun rupiah)

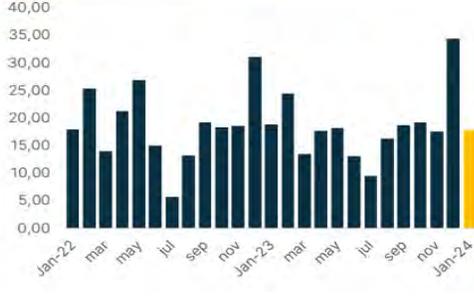
BEA MASUK Rp 3,9 T 6,7%



BEA KELUAR Rp 1,2 T 6,6%



CUKAI Rp 17,9 T 7,3%



surplus tersebut. Di sisi lain neraca Migas masih defisit, terutama disebabkan oleh impor bahan bakar dan minyak bumi.

Meskipun volume perdagangan telah meningkat (yoy), kinerja ekspor masih menunjukkan penurunan (yoy). Hal tersebut lebih dipengaruhi oleh penurunan harga. Tren harga komoditas terpantau masih menurun pada bulan Januari dan merupakan kelanjutan dari moderasi harga setelah *commodity boom* terjadi pada 2022.

Pada Januari 2024, kinerja ekspor berkontraksi 8,06 persen (yoy), penurunan terjadi pada sektor nonmigas maupun sektor Migas. Kinerja sektor nonmigas mengalami penurunan, kali ini mencapai 8,20 persen (yoy). Penurunan paling signifikan terjadi pada ekspor batubara dan minyak goreng kelapa sawit, masing-masing turun 29,74 persen dan 14,99 persen. Sedangkan pada ekspor sektor Migas berkontraksi 6,07 persen (yoy) dipengaruhi penurunan ekspor gas alam dampak pelemahan harga dan penurunan volume.

Sementara itu, kinerja impor meningkat 0,36 persen (yoy), meningkat pada sektor Nonmigas namun turun pada sektor Migas. Impor Nonmigas meningkat 1,76 persen (yoy) didorong oleh pertumbuhan impor komoditas utama seperti besi baja dasar dan bahan baku plastik. Sedangkan impor migas berkontraksi 7,15 persen (yoy) terutama akibat penurunan importasi bensin.

Hingga 31 Januari 2024, realisasi Penerimaan Kepabebean dan Cukai mencapai Rp22,91 triliun, 7,14 persen dari target. Realisasi Penerimaan PDRI lainnya mencapai Rp26,03 triliun. Sehingga Penerimaan Negara yang telah dikumpulkan dari Kepabebean dan Cukai serta PDRI lainnya mencapai Rp48,94 triliun.



Kinerja BM yang mencapai 6,72 persen dari target dipengaruhi oleh tarif efektif 1,38 persen, kurs USD yang mencapai Rp15.526 dan utilisasi FTA 35,0 persen.

Dari sisi Penerimaan, kinerja BM sejalan dengan pola realisasi penerimaan tahun-tahun sebelumnya yang tercapai 6,72 persen dari target. Capaian tersebut dipengaruhi oleh tarif efektif BM yang mencapai 1,38 persen, kurs USD yang mencapai Rp 15.526 dan utilisasi FTA sebesar 35,0 persen. Kinerja ini juga turut dipengaruhi oleh komoditas kontributor BM terbesar di antaranya, kendaraan roda empat beserta suku cadangnya, gas alam maupun buatan, dan mesin penambangan.

Penerimaan BK tercatat Rp1,16 triliun mencapai 6,63 persen dari target. Kinerja tersebut dipengaruhi oleh BK tembaga dengan kontribusi mencapai 87,1 persen atau sebesar Rp 1,0T didorong oleh relaksasi ekspor komoditas tembaga. Sedangkan BK produk sawit kali ini berkontribusi: 10,1 persen atau sebesar Rp0,12 T utamanya dipengaruhi penurunan harga.

Cukai merupakan mesin utama Penerimaan Kepabebean dan Cukai,



**Penerimaan Cukai
MMEA mencapai
Rp0,49 triliun, atau
5,26 persen dari target.
Kinerja ini didorong oleh
kebijakan kenaikan tarif
MMEA dan peningkatan
produksi ,terutama dari
produksi dalam negeri.**

dengan penerimaan Rp17,89 triliun, 7,27 persen dari target. Kinerja penerimaan ini masih *on track* dan mengikuti pola bulannannya. Kinerjanya dipengaruhi oleh penurunan Cukai Hasil Tembakau (CHT) sedangkan penerimaan dari Etil Alkohol (EA) dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) masih tumbuh.

Penerimaan CHT mencapai Rp17,89 triliun, 7,27 persen dari target. Kinerja tersebut dipengaruhi antara lain oleh produksi dan tarif efektif pada bulan November 2023 dan adanya pelunasan maju ke tahun 2023. Tarif efektif tersebut dipengaruhi oleh produksi Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) golongan 1 yang memiliki tarif tinggi terus mengalami penurunan lebih dalam dibandingkan jenis lainnya. Sedangkan pelunasan

maju terjadi karena adanya penerimaan yang jatuh tempo pada hari libur 1 Januari 2024 sehingga harus dilunasi maju pada Desember 2023.

Penerimaan Cukai MMEA mencapai 0,49 triliun atau 5,26 persen dari Target. Kenaikan Capaian ini didorong oleh kebijakan kenaikan tarif MMEA dan kinerja produksinya terutama dari produksi dalam negeri. Sedangkan untuk MMEA impor belum ada realisasi pada Januari 2024.

Sementara itu, kinerja Penerimaan Cukai EA mencapai Rp12,93 miliar atau 12,40 persen dari target. Kinerja tersebut terutama dipengaruhi oleh produksi EA bayar. Namun demikian perlu diketahui bahwa sebagian besar EA yang diproduksi, mencapai 96,62 persen tidak dipungut cukainya atau dibebaskan untuk keperluan medis, industri atau fasilitas lainnya.

Halaman Ini Dikосongkan

Geliat Pendapatan Kehutanan dan Perikanan di Awal 2024



Penerimaan Negara Bukan Pajak

Harga komoditas energi di pasaran masih termoderasi. Kondisi ini memberikan pengaruh atas kinerja PNBP Januari 2024. Secara keseluruhan, realisasi PNBP Januari 2024 masih dalam tren positif. Realisasi PNBP tercatat Rp43,26 triliun, 8,79 persen dari target. Pendapatan KND, Pendapatan BLU dan Pendapatan PNBP K/L menjadi kontributor utama yang mendorong capaian PNBP Januari 2024.

Pendapatan SDA mencapai Rp18,96 triliun, 8,13 persen dari target. Realisasi Pendapatan SDA Migas melambat dibandingkan periode yang sama 2023. Perlambatan ini terutama disebabkan oleh moderasi harga minyak mentah Indonesia (ICP) dan *lifting* minyak bumi yang menurun. Beberapa faktor yang



**Pendapatan KND,
Pendapatan BLU
dan Pendapatan
PNBP K/L menjadi
kontributor utama yang
mendorong capaian
PNBP Januari 2024.**

Realisasi PNBP s.d. 31 Januari 2024

PNBP	APBN 2024	Realisasi (Rp Triliun)		Capaian (%)	
		2023	2024	2023	2024
Penerimaan Negara Bukan Pajak	492.003,76	45.733,17	43.262,23	10,36	8,79
A Pendapatan SDA	207.669,95	26.228,07	18.962,57	13,38	9,13
1 Migas	110.154,56	11.632,26	9.533,42	8,87	8,65
a Minyak Bumi	80.535,31	11.632,26	9.533,42	12,10	11,84
b Gas Bumi	29.619,25	-	-	-	-
2 Nonmigas	97.515,39	14.595,81	9.429,15	22,52	9,67
a Pendapatan Pertambangan Minerba	85.840,00	14.254,48	8.798,97	26,38	10,25
b Pendapatan Kehutanan	6.000,00	307,10	519,34	5,95	8,66
c Pendapatan Perikanan	3.500,00	1,72	84,34	0,05	2,41
d Pendapatan Panas Bumi	2.175,39	32,51	26,51	1,54	1,22
B Pendapatan KND	85.845,47	4.594,99	6.771,52	9,36	7,89
C Pendapatan PNBP Lainnya	115.135,98	14.512,35	15.853,95	12,81	13,77
1 Pendapatan Penjualan Hasil Tambang	27.700,00	3.532,46	3.125,75	11,32	11,28
2 Pendapatan Minyak Mentah (DMO)	6.830,87	-	-	-	-
3 Pendapatan PNBP K/L	80.605,11	10.979,89	12.728,20	14,30	15,79
D Pendapatan BLU	83.352,38	397,75	1.674,19	0,48	2,01

menyebabkan harga ICP menurun antara lain gangguan pasokan minyak akibat ketegangan di Timur Tengah yang tidak terbukti, pelemahan Dollar Amerika Serikat, dan perkiraan permintaan minyak untuk 2024 yang menurun. Sementara itu, penurunan *lifting* minyak bumi disebabkan oleh tingkat penurunan alamiah sumur migas yang tinggi sejalan dengan fasilitas produksi migas utama yang telah menua. Pada periode Desember 2023, rata-rata ICP turun 1,52 persen dan *lifting* minyak bumi turun 1,99 persen.

Realisasi Pendapatan SDA Nonmigas mencapai Rp9,42 triliun, 9,67 persen dari target. Perlambatan kinerja tersebut disumbang oleh sektor Pertambangan Minerba dan sektor Panas Bumi.

Pendapatan Sektor Minerba mencapai Rp8,80 triliun dikarenakan penurunan harga mineral dan batubara di pasaran.

Pendapatan SDA Nonmigas sektor Kehutanan mencapai Rp519,34 miliar. Kenaikan tersebut disebabkan oleh peningkatan jumlah produksi kayu bulat

sebanyak 59.596 m³ dari 3.386.213 m³ pada periode Januari 2023 menjadi 3.445.809 m³ pada Januari 2024.

Sementara itu, sektor Perikanan menyumbang Rp84,34 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan pada Januari 2024 seluruh kapal perikanan telah memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) pascaproduksi sehingga pembayaran PNBP Pungutan Hasil Perikanan (PHP) semuanya menggunakan mekanisme pascaproduksi. Pada periode Januari 2023 belum terdapat realisasi PNBP Pungutan Hasil Perikanan (PHP) dengan mekanisme pascaproduksi. Meski realisasi PNBP sektor Perikanan 2023 belum menunjukkan hasil signifikan (masa transisi). Namun, realisasi Januari 2024 mulai mencatatkan kinerja yang semakin baik. Melalui pemberlakuan PP Nomor 85/2021 ini diharapkan semakin meningkatkan tata kelola yang lebih adil, terkendali, dan berkelanjutan. Pada mekanisme praproduksi, pelaku usaha harus membayar PNBP PHP sebelum



Sementara itu, sektor Perikanan menyumbang Rp84,34 miliar.

melakukan usaha penangkapan ikan untuk setahun ke depan. Dengan diberlakukannya mekanisme pascaproduksi, SIPI tidak dipungut PNBK (gratis) dan PHP dibebankan pada setiap volume ikan yang ditangkap pada setiap trip penangkapan ikan.

Selanjutnya, sektor Panas Bumi melandai 18,46 persen (yoy) yang disebabkan oleh pembayaran iuran tetap Rp6,81 miliar atas beberapa WKP milik PT PLN yang jatuh tempo pada 30 Januari 2024, namun telah dibayarkan pada Desember 2023.

Realisasi Pendapatan KND mencapai Rp6,77 triliun, 7,89 persen dari target. Perekonomian nasional yang pulih pada 2023 mendatangkan profit signifikan bagi BUMN khususnya BUMN Perbankan. Kontributor utama capaian Pendapatan KND Januari 2024 berasal dari pembayaran dividen interim BRI tahun buku 2023.

Capaian realisasi PNBK Lainnya mencapai Rp15,85 triliun, 13,77 persen dari target. Kinerja Pendapatan PNBK K/L Januari 2024 lebih baik dibandingkan Januari 2023. Adapun Pendapatan Penjualan Hasil Tambang (PHT) melambat dibanding periode yang sama tahun 2023.

Pendapatan PNBK K/L mencapai Rp12,73 triliun atau 15,79 persen dari target. Kenaikan ini terutama berasal dari pendapatan Layanan K/L yang disumbang antara lain dari pendapatan denda pada Kementerian ESDM, serta penerimaan kembali TAYL pada Kementerian PUPR dan Kementerian Sosial.

Selanjutnya, realisasi Pendapatan PHT mencapai Rp3,13 triliun atau 11,28 persen dari target. Pelambatan realisasi tersebut disebabkan oleh penurunan HBA dan volume produksi batubara.

Pendapatan BLU mencapai Rp1,67 triliun, 2,01 persen dari target. Capaian tersebut seluruhnya berasal dari pendapatan Nonsawit yang terutama bersumber dari jasa pelayanan Rumah Sakit di beberapa K/L, pendapatan jasa pelayanan pendidikan, dan pendapatan pengelolaan kawasan otorita. Sementara itu, hingga Januari 2024 belum terdapat pengesahan dari pendapatan BLU Sawit.

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) Terutama untuk pemberian Bantuan kepada Masyarakat, Dukungan Persiapan Pelaksanaan Pemilu, serta Pemenuhan Kewajiban Pemerintah.



Belanja Pemerintah Pusat

Realisasi BPP terutama digunakan untuk kewajiban pemerintah seperti gaji dan tunjangan pegawai serta pembayaran pensiun. Selain itu, realisasi BPP tersebut juga dipengaruhi oleh penyaluran bantuan sosial dan dukungan pelaksanaan Pemilu 2024, serta pemenuhan kewajiban pemerintah dalam rangka mempertahankan daya beli masyarakat seperti subsidi dan kompensasi.

BELANJA K/L

Realisasi Belanja K/L mencapai Rp44,76 triliun atau 4,10 persen dari



**Realisasi Belanja K/L
mencapai Rp44,76
triliun atau 4,10
persen dari pagu.**

**Realisasi Belanja Pemerintah Pusat s.d.
31 Januari 2024 (dalam triliun Rupiah)**

Belanja Pemerintah Pusat	APBN	Realisasi sd Januari	% thd APBN	Growth (%)
Belanja K/L	1.090,83	44,76	4,10	55,96
Belanja Pegawai	285,80	15,25	5,34	25,81
Belanja Barang	405,26	12,94	3,19	28,60
Belanja Modal	247,47	4,12	1,67	56,49
Bantuan Sosial	152,30	12,45	8,17	220,85
Belanja Non-K/L	1.376,70	51,63	3,75	(87,28)
a.l Belanja Pegawai	198,63	21,29	10,72	4,14
Belanja Lain-Lain	388,04	0,18	0,05	(6,63)
Total	2.467,53	96,39	3,91	(77,82)

pagu. Realisasi belanja K/L terutama dimanfaatkan untuk percepatan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH), penyaluran program bantuan kartu sembako, penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pengadaan peralatan/mesin, gedung/bangunan, serta kegiatan pelaksanaan pemilu 2024.

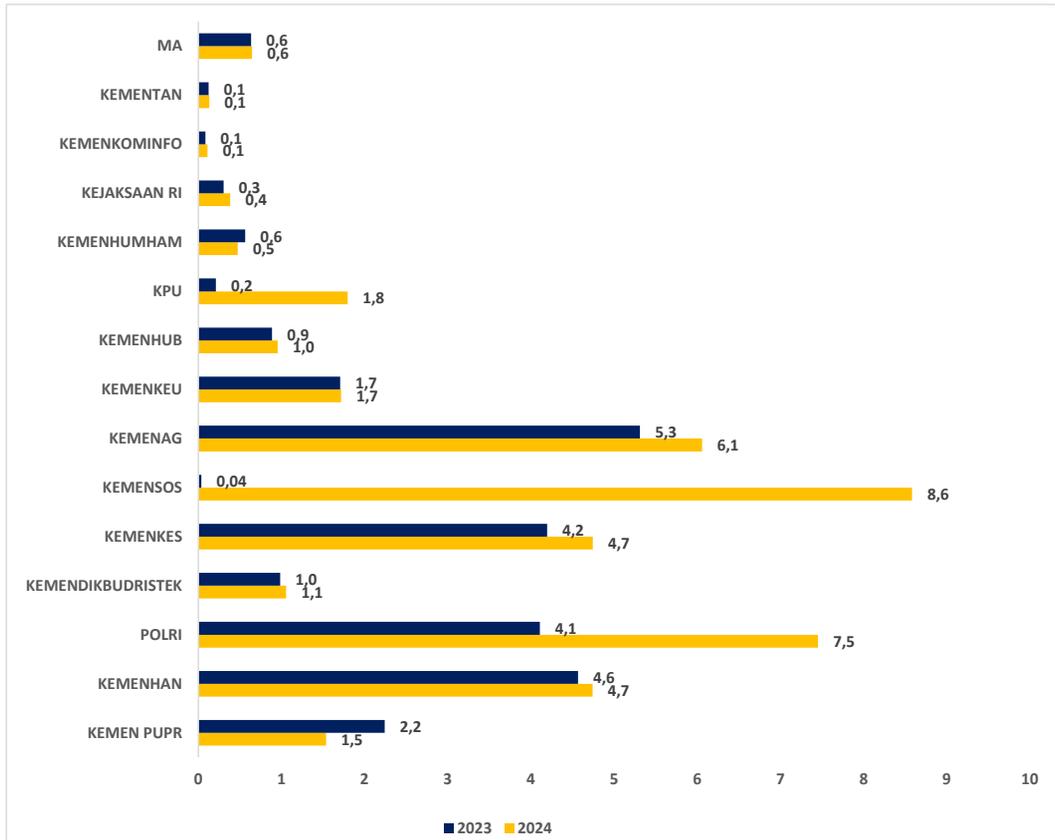
Belanja Pegawai terealisasi Rp15,25 triliun atau 5,34 persen dari pagu. Realisasi Belanja Pegawai tersebut digunakan untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN/TNI/POLRI.

Belanja Barang terealisasi Rp12,94 triliun atau 3,19 persen dari pagu, terutama dipengaruhi oleh penyaluran BOS dan persiapan pelaksanaan Pemilu 2024. Realisasi Belanja Barang dimanfaatkan antara lain untuk : (1) penyaluran dana BOS oleh Kementerian Agama (Kemenag); (2) Pembentukan Badan

Ad-Hoc, pengawasan masa kampanye, dan penetapan peserta Pemilu oleh KPU; (3) pelaksanaan operasi keamanan, pengadaan/dukungan logistik, dan Kepolisian Perairan oleh POLRI; (4) Pengawasan pelaksanaan Pemilu Pusat, Provinsi, dan Kota/Kabupaten oleh Bawaslu; dan (5) Pemeliharaan/perawatan Barang Milik Negara (BMN) dalam rangka mendukung alutsista dan nonalutsista pada Matra Darat, Laut, Udara dan Umum Integratif, dan pelayanan Kesehatan oleh Kemenhan.

Realisasi Belanja Modal mencapai Rp4,12 triliun. Kinerja realisasi Belanja Modal dipengaruhi antara lain oleh : (1) belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan dengan pemanfaatan antara lain untuk pembangunan prasarana bidang sumber daya air dan irigasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR); (2) belanja modal peralatan dan mesin

**Realisasi Belanja 15 Kementerian/Lembaga Dengan Pagu Terbesar s.d 31 Januari 2024
TA 2023-2024 (triliun Rupiah)**



dengan pemanfaatan antara lain pengadaan peralatan (sarpras bidang hankam) oleh POLRI; dan (3) realisasi belanja modal gedung dan bangunan dengan pemanfaatan antara lain pembangunan sarana dan prasarana bidang kesehatan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Realisasi Belanja Bantuan Sosial (Bansos) mencapai Rp12,45 triliun atau 8,17 persen dari pagu yang dipengaruhi penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tahap I dan penyaluran bantuan kartu sembako bulan Januari. Realisasi Belanja Bansos antara lain dimanfaatkan untuk: (1) penyaluran bantuan PKH bagi 9,2 juta Keluarga Penerima Manfaat

(KPM), (2) penyaluran bantuan program kartu sembako bagi 18,5 juta KPM, (3) penyaluran bantuan iuran bagi 96,7 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta (4) penyaluran bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) bagi 4.000 siswa dan bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi 4.000 mahasiswa.

Dari perspektif organisasi, realisasi Belanja K/L terutama disumbang oleh 15 K/L dengan pagu terbesar yang mewakili 90,2 persen dari total realisasi Belanja K/L. Realisasi tersebut terutama didorong antara lain oleh realisasi pada Kemensos, Kemenag, Kemenhan,

Kemenkes, POLRI, dan KPU.

Belanja Non-K/L

Realisasi Belanja NonK/L mencapai Rp51,63 triliun atau 3,75 persen dari pagu. Realisasi tersebut terutama digunakan untuk pembayaran manfaat pensiun. Belanja Pegawai NonK/L terealisasi Rp21,29 triliun atau 10,72 persen dari pagu, antara lain digunakan untuk pemenuhan kewajiban pemerintah terhadap para pensiunan ASN/TNI/POLRI.

Selanjutnya terdapat juga realisasi Belanja Subsidi Rp0,2 miliar. Realisasi tersebut berasal dari Subsidi Skema Resi Gudang (SSRG) yang merupakan pencairan atas penyaluran SSRG tahun sebelumnya. Sedangkan Subsidi yang lainnya masih belum ada realisasi karena proses administrasi dan menunggu verifikasi dokumen dari badan usaha.

Realisasi Belanja Lain-Lain mencapai Rp177,45 miliar atau 0,05 persen dari pagu. Realisasi tersebut dimanfaatkan antara lain untuk biaya operasional Program Kartu Prakerja Rp4,09 miliar dan dana operasional lembaga yang belum mempunyai Bagian Anggaran (SKK Migas dan Kawasan Bintan Karimun) Rp146,18 miliar.



Realisasi Belanja NonK/L mencapai Rp51,63 triliun atau 3,75 persen dari pagu. Realisasi tersebut terutama digunakan untuk pembayaran manfaat pensiun.

Halaman Ini Dikosongkan

**Penyaluran TKD Telah
Terealisasi Rp87,78
Triliun atau 10,24
Persen dari Pagu**



Transfer ke Daerah

Realisasi TKD sampai dengan 31 Januari 2024 mencapai Rp87,78 triliun atau 10,24 persen dari pagu. Secara lebih rinci, realisasi TKD masih berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik, dan Dana Desa. Sebagian dana TKD yang belum disalurkan karena masih menunggu penyampaian syarat salur dan/atau belum masuk jadwal penyaluran.

DANA BAGI HASIL

Hingga periode ini, penyaluran DBH mencapai Rp13,19 triliun atau 9,22 persen dari pagu. Kinerja DBH tersebut terutama disebabkan oleh pagu DBH SDA Minerba 2024 yang bertambah.

DANA ALOKASI UMUM

Realisasi penyaluran DAU pada Januari mencapai Rp45,15 triliun atau 10,56 persen dari pagu. Capaian tersebut masih dapat ditingkatkan karena ada beberapa daerah yang belum menyampaikan laporan realisasi Belanja Pegawai berupa gaji ASN (PNSD dan PPPK) November 2023 sebagai syarat penyaluran DAU Januari 2024.

DANA TRANSFER KHUSUS

Dana Transfer Khusus belum terdapat realisasi penyaluran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. Hal ini disebabkan penyaluran DAK Fisik dilakukan paling cepat pada Februari setelah Kepala KPPN menerima dokumen persyaratan penyaluran dengan lengkap dan benar.

Realisasi TKD T.A. 2022 & 2024 Tanggal: 1 – 31 Januari 2024 (dalam triliun Rupiah)

Uraian	2022		2024		%
	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	
Transfer ke Daerah	814,72	58,19	857,59	87,78	10,24
1. Dana Bagi Hasil	136,26	10,82	143,10	13,19	9,22
2. Dana Alokasi Umum	396,00	47,37	427,70	45,15	10,56
3. Dana Transfer Khusus	185,80	0,00	188,10	27,53	14,64
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	53,42	0,00	53,82	0,00	0,00
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	130,30	0,00	133,76	27,53	20,58
c. Hibah ke Daerah	2,08	0,00	0,51	0,00	0,00
4. Dana Otsus	17,24	0,00	18,27	0,00	0,00
5. Dana Keistimewaan D.I.Y	1,42	0,00	1,42	0,00	0,00
6. Dana Desa	70,00	0,00	71,00	1,91	2,69
7. Insentif Fiskal	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00

Dalam rangka percepatan pelaksanaan DAK Fisik 2024, telah dilakukan penyelesaian penyusunan Rencana Kegiatan (RK) oleh Pemda bersama K/L teknis pada akhir Desember 2023. Namun dengan kondisi tertentu dapat dilakukan Revisi RK maksimal pada minggu kedua Maret 2024. Selain itu pada Januari 2024, sebagian besar Pemda juga telah menyusun Peraturan Daerah mengenai APBD dan mempersiapkan kontrak pengadaan barang/jasa kegiatan DAK Fisik sebagai salah satu syarat salur DAK Fisik.

Sementara itu, DAK Nonfisik telah disalurkan Rp27,53 triliun atau 20,58 persen dari pagu. Capaian tersebut karena di Januari dilakukan penyaluran Tahap I Dana BOSP yang terdiri atas Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan. Selain itu, terdapat perbaikan tata kelola penyampaian data BOS di daerah dan di Kemendikbud.

DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA KEISTIMEWAAN D.I. YOGYAKARTA

Dana Otonomi Khusus belum terdapat realisasi penyaluran dikarenakan belum ada daerah penerima Dana Otonomi Khusus yang menyampaikan dokumen syarat salur kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Dokumen syarat salur Dana Otonomi Khusus Tahap I disampaikan paling lambat akhir April 2024 sesuai PMK Nomor 76/PMK.07/2022.

Sementara itu, Dana Keistimewaan belum terdapat realisasi penyaluran karena dokumen permintaan salur sebagai syarat salur Dana Keistimewaan belum diterima. Penyaluran Tahap I Dana Keistimewaan 15 persen dari pagu alokasi Dana Keistimewaan TA 2024.

DANA DESA

Sampai dengan periode ini, Dana Desa telah disalurkan Rp1,91 triliun atau 2,69



Sampai dengan periode ini, Dana Desa telah disalurkan Rp1,91 triliun atau 2,69 persen dari pagu.

persen dari pagu. Capaian tersebut dipengaruhi oleh redesign penyaluran Dana Desa melalui pemisahan penyaluran Dana Desa earmarked dan non-earmarked berdasarkan kinerja pelaksanaan, dan pemberian reward berupa percepatan penyaluran Dana Desa untuk desa berstatus Mandiri. Selain itu, terjadi peningkatan kepatuhan penyampaian syarat penyaluran oleh pemerintah daerah dan desa sehingga kinerja penyaluran Dana Desa mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya.

INSENTIF FISKAL

Pada 2024, pemerintah mengalokasikan Insentif Fiskal (IF) TA 2024 sebesar Rp8,00 triliun dengan tujuan untuk dapat memberikan penghargaan bagi pemerintah daerah yang mempunyai kinerja baik dan juga dapat memacu daerah lainnya untuk melakukan percepatan capaian kinerjanya. Alokasi sebesar Rp8,00 triliun dibagi menjadi alokasi yang didasarkan pada kinerja tahun sebelumnya sebesar Rp4,00 triliun dan kinerja atas tahun berjalan sebesar Rp4,00 triliun. Alokasi IF atas kinerja tahun sebelumnya telah dialokasikan per daerah, namun belum ada penyaluran di bulan Januari karena sesuai dengan PMK nomor 25 tahun 2023 alokasi tersebut

disalurkan paling cepat Februari setelah pemda menyampaikan syarat salur. PMK nomor 208/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan IF. Sedangkan IF 2024 masih dalam proses pengalokasian.

Insentif Fiskal belum terdapat penyaluran karena didasarkan ketentuan dalam PMK 208/PMK.07/2022 bahwa penyaluran IF atas kinerja tahun sebelumnya tahap pertama dilakukan paling cepat Februari. Penyaluran IF atas kinerja tahun sebelumnya tahap pertama dapat dilakukan setelah pemda menyampaikan syarat salur berupa Peraturan Daerah APBD 2024, laporan realisasi IF 2023 (bagi yang mendapatkan), dan laporan rencana penggunaan IF 2024.

Halaman Ini Dikosongkan

An aerial night view of a city skyline. The foreground shows a dense residential area with many small houses and trees. In the middle ground, several tall skyscrapers are illuminated with warm yellow lights, their windows glowing. The background shows more skyscrapers against a dark blue sky. The overall scene is a mix of modern urban architecture and traditional residential housing.

Pembiayaan Utang Dalam Batas Aman dan *Managable* Mendukung Konsolidasi untuk Menjaga Kesinambungan Fiskal

Foto: Kemenkeu - Resha Aditya

Pembiayaan Utang

Defisit APBN 2024 ditargetkan sebesar 2,29 persen dari PDB, dengan realisasi hingga akhir Januari 2024 terkendali dalam batas aman (*prudent*) sebesar 0,14 persen dari PDB. Penetapan defisit APBN tidak lepas dari keputusan pemerintah menerapkan kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan ekspansif dilakukan dengan terukur, terarah, dan konsisten untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan melindungi daya beli masyarakat sehingga kondisi fiskal terjaga tetap sehat dan berkelanjutan. Pembiayaan utang menjadi salah satu instrumen untuk menutupi defisit tersebut, dan dijalankan secara hati-hati, fleksibel, oportunistik dan akuntabel.

Realisasi pembiayaan utang sampai dengan akhir Januari 2024 mencapai Rp107,56 triliun atau 16,6 persen dari

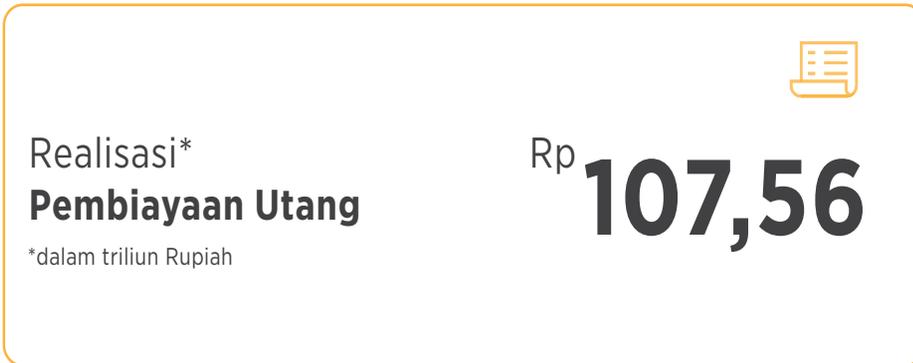
target, terdiri atas realisasi SBN (Neto) yang mencapai Rp111,30 triliun dan realisasi Pinjaman (Neto) tercatat negatif Rp3,74 triliun.

Penerbitan SBN di pasar domestik menjadi prioritas dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN untuk mengendalikan risiko. Guna mencapai efisiensi biaya utang, pemerintah berupaya mendorong terciptanya pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid di antaranya melalui lelang SBN domestik secara reguler dengan mekanisme pasar di mana investor menyampaikan penawaran (*bid*) kompetitif melalui Dealer Utama. Selama bulan Januari 2024, telah dilaksanakan 5 kali lelang SBN yang terdiri atas 3 lelang SUN dan 2 lelang SBSN. Kinerja lelang SBN pada bulan Januari mencatatkan *bid to cover ratio* 2,48x dengan rata-rata penawaran

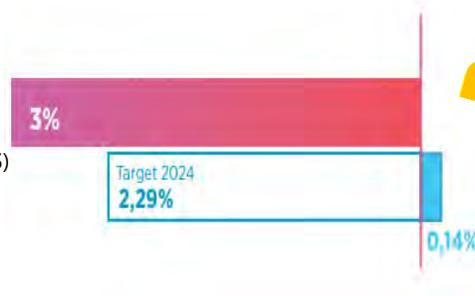
Pembiayaan Utang

Per 31 Januari 2024

“ Pembiayaan utang dalam batas aman dan *manageable* mendukung konsolidasi untuk menjaga kesinambungan fiskal



Batas aman defisit APBN (UU Nomor 17/2003)



“ Defisit APBN 2024 ditargetkan sebesar 2,29% dari PDB, dengan realisasi hingga akhir Januari 2024 surplus 0,14% dari PDB.

yang masuk tercatat Rp46,54 triliun/lelang dan rata-rata nominal yang dimenangkan mencapai Rp18,75 triliun/lelang.

Selanjutnya, sebagai pelengkap untuk menghindari *crowding out effect* di pasar domestik, pada awal Januari 2024, pemerintah melakukan transaksi penerbitan SUN Valas (*Global Bond*) di pasar internasional USD2,05 miliar dengan tenor 5, 10 dan 30 tahun. Penerbitan SBN di pasar global dilakukan hati-hati dengan tetap memperhatikan *cost of fund* yang menarik, Berkat kondisi pasar yang stabil dengan suku bunga yang menguntungkan dan minat investor global yang tinggi terhadap surat berharga Indonesia, pemerintah berhasil menekan harga (*price tightening*) dengan *yield* yang lebih rendah dari dari *Initial Price Guidance* (IPG) untuk semua seri yang diterbitkan.

Sementara itu, ditinjau dari posisi utang pemerintah yang *outstanding*, jumlah utang pemerintah per akhir Januari 2024 tercatat Rp8.253,09 triliun dengan rasio utang terhadap PDB 38,75 persen. Rasio utang ini masih di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara serta lebih baik dari yang telah ditetapkan melalui Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah 2024–2027 di kisaran 40 persen. Pengelolaan portofolio utang berperan besar dalam menjaga kesinambungan fiskal secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintah konsisten mengelola utang secara cermat dan terukur dengan menjaga risiko suku bunga, mata uang, likuiditas, dan jatuh tempo yang optimal. Pengelolaan utang yang disiplin turut menopang hasil asesmen lembaga pemeringkat kredit (S&P, Fitch, Moody's, R&I, dan JCR) yang hingga saat ini tetap mempertahankan *sovereign rating* Indonesia pada level *investment grade* di tengah dinamika perekonomian



Pemerintah senantiasa melakukan pengelolaan utang secara cermat dan terukur lewat komposisi mata uang, suku bunga, serta jatuh tempo yang optimal.

global dan volatilitas pasar keuangan.

Selaras dengan kebijakan umum pembiayaan utang untuk mengoptimalkan sumber pembiayaan dalam negeri dan memanfaatkan utang luar negeri sebagai pelengkap, mayoritas utang pemerintah berasal dari utang dalam negeri dengan proporsi 71,60 persen. Sementara berdasarkan instrumen, komposisi utang pemerintah sebagian besar berupa SBN yang mencapai 88,19 persen. Selain itu, pemerintah juga mengutamakan pengadaan utang dengan jangka waktu menengah-panjang dan melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif. Per akhir Januari 2024, profil jatuh tempo utang pemerintah terhitung cukup aman dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo (*average time maturity/ATM*) di kisaran 8 tahun.

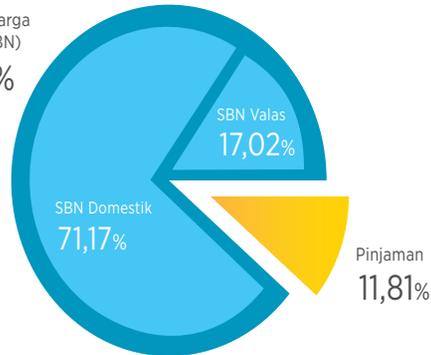
Pasar surat utang negara (*sovereign debt*) yang efisien akan meningkatkan daya tahan sistem keuangan Indonesia terhadap guncangan ekonomi dan pasar keuangan. Dengan aktivitas pembiayaan utang melalui penerbitan SBN, pemerintah turut mendukung

Komposisi Utang

***Data per 31 Januari 2024**

ff Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik

Surat Berharga Negara (SBN)
88,19%



Posisi Utang

Rp **8.253,09**
*dalam triliun Rupiah

Surat Berharga Negara

Rp **7.278,03**

*dalam triliun Rupiah



• Domestik	Rp 5.873,38
Surat Utang Negara	Rp 4.741,85
Surat Berharga Syariah Negara	Rp 1.131,54
• Valas	Rp 1.404,65
Surat Utang Negara	Rp 1.058,17
Surat Berharga Syariah Negara	Rp 346,49

Pinjaman

Rp **975,06**

*dalam triliun Rupiah



• Pinjaman DN*	Rp 36,23
• Pinjaman LN*	Rp 938,83
Bilateral	Rp 271,14
Multilateral	Rp 575,64
Comercial Banks	Rp 92,04
Suppliers	Rp -

batas aman rasio utang
(UU No. 17/2003)



* berdasarkan realisasi PDB Tahun 2023

** berdasarkan proyeksi PDB Triwulan I Tahun 2024

Debt to GDP



38,75%

ff Pemerintah konsisten mengelola utang secara cermat dan terukur dengan menjaga risiko suku bunga, mata uang, likuiditas, dan jatuh tempo yang optimal

pengembangan dan pendalaman pasar keuangan domestik. Surat Berharga Negara turut menyediakan referensi untuk menentukan harga instrumen pasar keuangan lainnya dan digunakan oleh para pelaku pasar untuk mengelola risiko suku bunga.

Per akhir Januari 2024, lembaga keuangan memegang sekitar 45,9 persen kepemilikan SBN domestik, terdiri atas perbankan 27,4 persen dan perusahaan asuransi dan dana pensiun 18,5 persen. Bagi lembaga keuangan, SBN berperan penting dalam memenuhi kebutuhan investasi dan pengelolaan likuiditas, serta menjadi salah satu instrumen mitigasi risiko. Kepemilikan SBN domestik oleh Bank Indonesia sekitar 18,7 persen yang antara lain digunakan sebagai instrumen pengelolaan moneter. Sementara, asing hanya memiliki SBN domestik sekitar 14,8 persen termasuk kepemilikan oleh pemerintah dan bank sentral asing. Sejalan dengan upaya pemerintah memperluas basis investor, inklusi keuangan dan peningkatan literasi keuangan masyarakat dari *savings society* menjadi *investment society*, kepemilikan investor individu di SBN domestik terus mengalami peningkatan sejak 2019 yang hanya di bawah 3 persen menjadi 7,7 persen per akhir Januari 2024. Sisa kepemilikan SBN domestik dipegang oleh institusi domestik lainnya untuk memenuhi kebutuhan investasi dan pengelolaan keuangan institusi bersangkutan.

Selanjutnya, guna meningkatkan efisiensi pengelolaan utang dalam jangka panjang, pemerintah terus berupaya mewujudkan pasar SBN domestik yang dalam, aktif, dan likuid. Salah satu strateginya melalui pengembangan berbagai instrumen SBN, termasuk pula pengembangan SBN tematik berbasis lingkungan (*Green Sukuk*) dan *SDGs* (*SDG Bond* dan *Blue Bond*). Peranan transformasi digital dalam proses penerbitan dan penjualan SBN yang didukung dengan sistem *online* juga tidak kalah penting, serta mampu membuat pengadaan utang melalui SBN menjadi semakin efektif dan efisien, serta kredibel.





Calendar *Event* **2024**



<p>Penyusunan Kapasitas Fiskal (<i>Resource Envelope</i>) Penawaran SBN Ritel ORI025 Lomba Debat APBN - Mahasiswa DJA Menyapa</p>	<p>Penyampaian Pagu Indikatif RAPBN 2025 Penawaran SBN Ritel ST012 Lomba Debat APBN - Mahasiswa Lomba Konten APBN - SMP</p>	<p>Pembicaraan Pendahuluan RAPBNTA 2025 Penyampaian Pagu Anggaran RAPBN 2025 Penawaran SBN Ritel SBR013 Penawaran SBN Ritel SWR005</p>
---	---	--



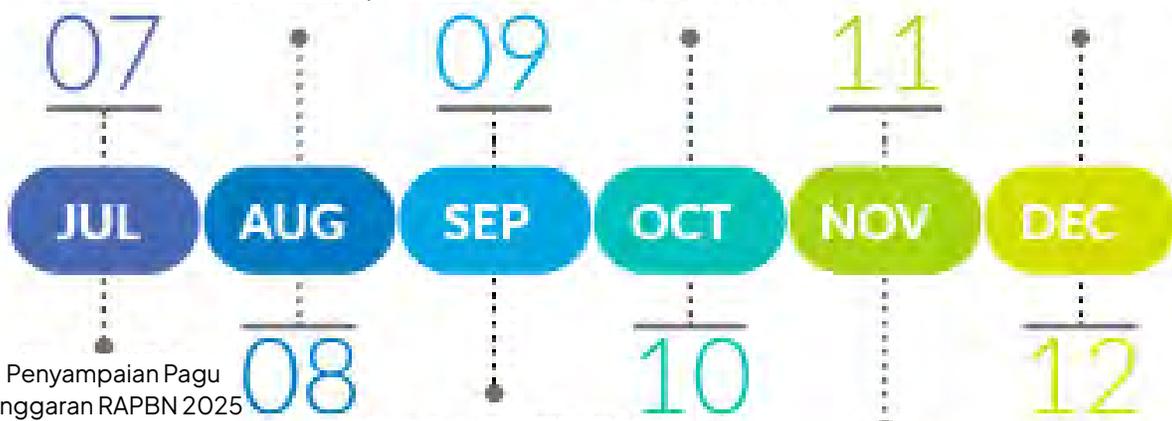
<p>Penawaran SBN Ritel ORI025 DJA Menyapa</p>	<p>Penyusunan Kapasitas Fiskal Penyampaian Pagu Indikatif RAPBN 2025 Penawaran SBN Ritel SRO20 Lomba Debat APBN - Mahasiswa Budget Goes to Campus</p>	<p>Penyampaian Dokumen KEM PPFTA 2025 Penawaran SBN Ritel ST012 Penawaran SBN Ritel SBR013 Lomba Debat APBN - Mahasiswa Lomba Konten APBN - SMP</p>
---	---	---



Pidato Presiden dalam rangka
Penyampaian RUU APBN
2025 dan Nota Keuangan
Penawaran SBN Ritel SR021
Lomba Cerdas Cermat APBN - SMA
Lomba Video Mengajar
APBN - Guru SMA/SMP

Pembahasan RUU APBN
2025 dan Nota Keuangan
Penetapan Peraturan Presiden
tentang Rincian APBN TA 2025
Penawaran SBN Ritel ORIO26
Lomba Video Mengajar
APBN - Guru SMA/SMP
Budget Goes to Campus
HORI 78 Tahun 2024

DJA Menyapa
Penawaran SBN Ritel ST013



Penyampaian Pagu
Anggaran RAPBN 2025
Penawaran SBN Ritel SBR013
Penawaran SBN Ritel SWR005
Lomba Cerdas Cermat
APBN - SMA
Lomba Video Mengajar
APBN - Guru SMA/SMP
Budget Goes to Campus

Pembahasan RUU APBN
2025 dan Nota Keuangan
Penawaran SBN Ritel SR021
Penawaran SBN Ritel ORIO26
Lomba Cerdas Cermat APBN - SMA
Lomba Video Mengajar
APBN - Guru SMA/SMP

Penetapan DIPA Tahun 2025
Penawaran SBN Ritel ST013

PUSTAKA LITERASI

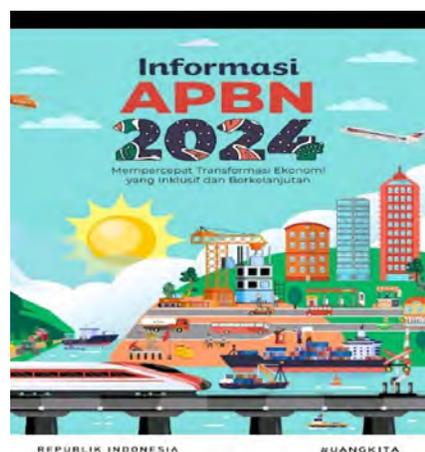




Scan Untuk Unduh Buku



Scan Untuk Unduh Buku



Scan Untuk Unduh Buku



Laporan Khusus



Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal Pasca UU HKPD

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia berawal dengan semangat untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan di daerah. Transfer ke daerah menjadi instrumen fiskal APBN untuk mendukung pendanaan pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangan yang telah didelegasikan oleh pemerintah pusat. Desain transfer ke daerah tidak hanya ingin berfokus pada tujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah (kesenjangan vertikal) dan antar pemerintah daerah (kesenjangan horizontal), namun juga mengakselerasi pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penyediaan layanan publik yang merata di seluruh daerah Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) sebagai upaya untuk mempertajam pelaksanaan desentralisasi fiskal. UU HKPD mendorong pemda dalam melakukan optimalisasi penerimaan dan belanja daerah dengan empat pilar utamanya, yaitu penurunan ketimpangan vertikal dan horizontal, penguatan *local taxing power*, peningkatan kualitas belanja di daerah, dan harmonisasi belanja pusat dan daerah.

Kebijakan desentralisasi fiskal yang telah dilakukan oleh Kementerian Keuangan sejak awal hingga peraturan terbaru dalam Undang-Undang Nomor 1/2022, telah meningkatkan dana transfer ke

daerah dalam APBN dengan jumlah yang sangat signifikan. Peningkatan dana transfer tersebut juga diikuti dengan kebijakan transformasi postur dan reformulasi transfer ke daerah sebagai upaya penajaman fungsi setiap jenis transfer dan untuk pengelolaan transfer yang lebih baik.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal pasca UU HKPD akan diterapkan secara efektif pada 2024, sedangkan pada 2023 hanya beberapa regulasi yang sudah mulai diimplementasikan yaitu DAU *Earmarked* dan DBH. Kementerian Keuangan telah menerbitkan lima Peraturan Pemerintah (PP) turunan UU HKPD yaitu:

- PP Nomor 4/2023 tentang PBJT atas Tenaga Listrik yang diundangkan pada 20 Januari 2023;
- PP Nomor 35/2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (KUPDRD) yang diundangkan pada 16 Juni 2023;
- PP Nomor 37/2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah yang telah diundangkan pada 24 Juli 2023;
- PP Nomor 38/2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit yang telah diundangkan pada 24 Juli 2023;
- PP Nomor 1/2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (HKFN) yang telah diundangkan pada 2 Januari 2024.

Dengan telah diterbitkannya seluruh PP tersebut, Kementerian Keuangan terus berupaya agar era baru desentralisasi pasca UU HKPD ini dapat lebih memberikan dampak atau lebih *impactful*.

Setiap tahun hampir sepertiga belanja APBN digunakan untuk transfer ke daerah, yang tujuannya adalah memperkuat kualitas fiskal daerah dalam menjalankan kewenangannya untuk turut mengakselerasi serta

memeratakan pembangunan dan layanan publik dalam rangka berkontribusi kepada pencapaian target prioritas nasional. Pada APBN 2024, alokasi TKD ini mencapai Rp857,59 triliun dari total belanja negara yang sebesar Rp3.325 triliun. Dengan jumlah seperti itu, anggaran transfer ke daerah masih menjadi penopang utama APBD. Namun demikian, pertumbuhan TKD masih belum diikuti dengan kualitas serapan belanja daerah yang optimal. Selain praktek penyerapan belanja daerah yang biasanya baru meningkat pada kuartal kedua hingga keempat, inefisiensi belanja daerah baik dari segi kualitas dan produktivitas, tentu saja menjadi rintangan dalam percepatan transformasi ekonomi yang diusung pemerintah.

Undang-undang HKPD menjadi salah satu solusi utama agar pemerintah daerah dapat mengeksekusi belanja APBD secara responsif, optimal, dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat di daerah. Salah satu lingkup UU HKPD ini adalah mewujudkan belanja daerah yang berkualitas agar lebih efisien, produktif, dan akuntabel. Atas dasar belanja berkualitas ini, Kementerian Keuangan telah melakukan berbagai strategi untuk meningkatkan kualitas pengalokasian belanja daerah agar lebih produktif dan fokus pada layanan dasar kepada masyarakat sehingga terjadi akselerasi pemerataan kualitas layanan publik dan kesejahteraan di daerah. Langkah strategis yang telah diimplementasikan antara lain belanja daerah yang fokus pada layanan dasar publik di daerah, disiplin pengalokasian belanja yang diwajibkan atau *mandatory spending*, seperti pendidikan 20 persen, belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD, dan penguatan belanja infrastruktur dengan menerapkan batasan minimal belanja infrastruktur sebesar 40 persen dari APBD, serta optimalisasi penggunaan *SiLPA non-earmarked*

untuk belanja daerah berdasarkan kinerja layanan publik daerah. Jika kinerja layanan suatu daerah sudah dapat diklasifikasikan tinggi, maka pemerintah daerah dapat menginvestasikan atau membentuk dana abadi daerah. Sebaliknya, jika kinerja layanan masih rendah, kita arahkan untuk belanja infrastruktur pelayanan publik.

Ke depannya, diharapkan agar pelaksanaan anggaran pada tahun ini dan tahun-tahun berikutnya dapat terus ditingkatkan, baik dalam hal tata kelola, kualitas belanja, maupun dalam hal monitoring dan evaluasinya, sehingga *good governance* dan *spending better* dalam pengelolaan dan pelaksanaan anggaran pemerintah dapat terwujud. Selain itu, komitmen dari seluruh pengelola keuangan pada K/L maupun pemerintah daerah juga sangat penting agar tidak hanya menjalankan rutinitas membelanjakan uang APBN, tetapi juga memastikan keluaran *output* dan *outcome* berkualitas yang menambah nilai ekonomi dan sosial.

Selanjutnya, sinergi kebijakan fiskal nasional juga dilakukan dalam rangka mendukung pengelolaan fiskal pusat dan daerah yang terintegrasi, seperti *refocusing*, penyesuaian belanja daerah dan belanja pusat, serta penyeselarasan kebijakan fiskal nasional dan target capaian pembangunan nasional. Rentang sinergi kebijakan fiskal nasional ini dimulai sejak tahap penyusunan dokumen perencanaan hingga penyusunan dokumen pelaporan. Sinergi kebijakan fiskal nasional dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya melalui penyeselarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah, penetapan batas maksimal defisit APBD dan pembiayaan utang daerah, pengendalian dalam kondisi darurat, batas maksimal kumulatif defisit APBD dan Pembiayaan Utang Daerah, pengendalian dalam kondisi darurat,

sinergi bagan akun standar, platform digital, serta sanksi dan insentif.

Beberapa program dan kegiatan yang mendukung terlaksananya sinergi kebijakan fiskal nasional yaitu:

- Penyusunan konsolidasi informasi keuangan pemerintah daerah secara nasional sesuai dengan bagan akun standar untuk pemerintah daerah;
- Penyajian informasi keuangan daerah secara nasional;
- Pemantauan dan evaluasi pendanaan desentralisasi;
- Pemanfaatan platform digital sinergi kebijakan fiskal nasional dilakukan melalui interkoneksi antara Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Kementerian Keuangan dengan



Pemanfaatan platform digital sinergi kebijakan fiskal nasional dilakukan melalui interkoneksi antara Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Kementerian Keuangan dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri. Di sisi pengelolaan keuangan desa, interkoneksi juga dilakukan antara SIKD Teman Desa dengan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang digunakan oleh pemerintah desa. Dengan adanya interkoneksi antar sistem tersebut diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan keuangan daerah dan desa berbasis elektronik yang terintegrasi;

- Klausul baru pada UU HKPD yang mewajibkan pemda untuk membuat satu perda yang mengatur seluruh jenis pajak. Jadi artinya, ketentuan untuk setiap jenis pajak tidak boleh diatur melalui banyak perda seperti sebelumnya.

Meskipun dalam prakteknya menyambung keterkaitan langkah fiskal antara Pusat dan Daerah itu tidak mudah, penerapan Sinergi Fiskal Pusat dan Daerah untuk Kebijakan Fiskal yang Berkualitas, diharapkan dapat mengatur secara kuat upaya untuk sinergi fiskal nasional. Hal tersebut dengan tujuan agar gerak langkah pusat dan daerah menjadi lebih harmonis, sehingga target-target pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat lebih mudah dicapai, dengan cara yang lebih efisien dan lebih efektif.

Implementasi UU HKPD ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata di seluruh Indonesia serta meningkatkan kualitas layanan publik yang memadai dan terstandarisasi secara nasional. Pelaksanaan UU HKPD juga dapat meningkatkan kualitas belanja melalui pengendalian belanja pegawai serta mandatory spending bagi penguatan belanja infrastruktur yang selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan mendukung perekonomian di daerah. Implementasi UU HKPD ini juga diharapkan dapat

memotivasi daerah dalam meningkatkan kemampuan daerah untuk terus menggali potensi pendapatan asli daerahnya sehingga akan mengurangi ketergantungan terhadap APBN secara inkremental dan berkelanjutan. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan dapat mempedomani semangat UU HKPD untuk terus membuat strategi taktis yang mampu meningkatkan pengelolaan APBD sebagai instrumen fiskal untuk pelaksanaan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakatnya.

Layanan Baru DJP: Lupa EFIN Melalui Email

Menjelang tenggat waktu pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi pada 31 Maret 2024, wajib pajak berbondong-bondong melaporkan pajaknya secara daring. Namun, tak jarang terkendala melaporkan karena lupa *password* untuk masuk ke aplikasi. Untuk menyelesaikan kendala tersebut, wajib pajak harus me-*reset password* dengan menggunakan *Electronic Filing Identification Number* (EFIN).

EFIN adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh DJP kepada wajib pajak yang melakukan transaksi elektronik dengan DJP. EFIN digunakan pertama kali ketika wajib pajak melakukan registrasi akun pada laman situs DJP.

Layanan terkait EFIN ada dua yaitu aktivasi EFIN dan lupa EFIN. Sebenarnya, hanya ada satu EFIN untuk setiap wajib pajak dan nomor tersebut tidak pernah berubah, kecuali ketika ada permintaan EFIN baru. Selama tidak ada permintaan EFIN baru, EFIN yang ada dalam data DJP adalah EFIN yang pernah diaktivasi. Diharapkan ketika wajib pajak sudah mengaktivasi EFIN, dia menyimpan EFIN tersebut atau mengecek EFIN yang dikirimkan DJP ke surat elektronik/surel (*email*) yang didaftarkan.

Di masa sebelum pandemi, ada perbedaan mendasar antara layanan aktivasi EFIN dan lupa EFIN yaitu aktivasi EFIN harus dilakukan secara langsung di kantor pajak sedangkan lupa EFIN tidak demikian. Untuk wajib pajak orang pribadi diberikan kemudahan, yaitu

aktivasi EFIN dapat dilakukan secara langsung di kantor pajak terdekat. Jadi, misalnya wajib pajak orang pribadi tersebut berdomisili di Medan padahal terdaftar di Makassar, maka dia bisa mengaktivasi EFIN di kantor pajak Medan yang terdekat dengan domisili. Hal ini tidak berlaku untuk wajib pajak selain orang pribadi, sebab harus melakukan aktivasi EFIN di kantor pajak terdaftar.

Dibandingkan layanan aktivasi, layanan lupa EFIN mempunyai beberapa kanal alternatif. Karena EFIN sudah diaktivasi, petugas hanya perlu melakukan verifikasi data dan memberikan EFIN apabila syarat-syaratnya terpenuhi. Selain datang langsung ke kantor pajak terdekat, wajib pajak orang pribadi dapat memanfaatkan layanan lupa EFIN melalui fitur *Live Chat* pada situs pajak, atau dengan menelepon Kring Pajak 1500200.

Pada masa pandemi, untuk memudahkan wajib pajak dan mendukung upaya pencegahan penyebaran pandemi Covid-19, layanan aktivasi EFIN dan lupa EFIN dapat diajukan melalui surel resmi kantor pajak. Namun, sejak terbit Keputusan Presiden Nomor 17/2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Indonesia, status pandemi Covid-19 telah berakhir dan diubah menjadi endemi pada tanggal 21 Juni 2023. Akibatnya, layanan aktivasi dan lupa EFIN tersebut kembali pada keadaan sebelum pandemi, yaitu aktivasi dilakukan secara langsung dan lupa EFIN tidak lagi dilayani melalui surel kantor pajak.

Untuk memudahkan wajib pajak terkait lupa EFIN, sejak 5 Februari 2024 DJP menambah layanan lupa EFIN melalui



Untuk memudahkan wajib pajak terkait lupa EFIN, sejak 5 Februari 2024 DJP menambah layanan lupa EFIN melalui kanal baru yaitu surel pada alamat lupa.efin@pajak.go.id.

kanal baru yaitu surel pada alamat lupa. efin@pajak.go.id. Layanan ini khusus ditujukan bagi wajib pajak orang pribadi.

Tata Cara Lupa EFIN Melalui Surel

Untuk mengajukan permohonan lupa EFIN, wajib pajak mengirimkan permohonan ke alamat surel lupa. efin@pajak.go.id dengan mencantumkan subjek LUPA EFIN. Surel tersebut wajib berisi data NPWP, nama wajib pajak, alamat wajib pajak terdaftar, alamat surel terdaftar, dan nomor telepon/ponsel terdaftar, agar dapat dilakukan verifikasi data oleh petugas.

Untuk melengkapi permohonan, wajib pajak orang pribadi wajib menulis kalimat afirmasi dengan mengetik *“Saya menyatakan bahwa saya adalah wajib pajak yang memiliki hak untuk mengakses informasi yang diminta. Saya bersedia menanggung akibat hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang*

LUPA EFIN

Saluran layanan lupa EFIN yang dapat diakses oleh Wajib Pajak adalah:

Wajib Pajak Orang Pribadi

- ☎ Telepon **1500200***
- 💬 Live Chat **www.pajak.go.id***
- ✉ Email **lupa.efin@pajak.go.id**
- 📱 Aplikasi **M-Pajak**
- 📍 Datang ke KPP/KP2KP **terdekat****

Wajib Pajak Badan

- ☎ Telepon **1500200***
- 💬 Live Chat **www.pajak.go.id***
- 📍 Datang ke KPP/KP2KP **terdaftar****

* Dilayani pada hari kerja pukul 08.00 – 16.00 WIB
** Dilayani pada hari kerja pukul 08.00 – 16.00 waktu setempat



Tata Cara

Layanan Lupa EFIN melalui **Kanal Email**

Wajib Pajak Orang Pribadi mengirimkan permohonan lupa EFIN ke email: **lupa.efin@pajak.go.id**

Menggunakan alamat email Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar dengan subjek email: **"LUPA EFIN"**

Wajib mencantumkan:

1. NPWP
2. Nama Wajib Pajak
3. Alamat terdaftar
4. Alamat email terdaftar (email WP ORP terdaftar)
5. Nomor telepon/handphone terdaftar
6. Melakukan afirmasi dengan mengetik

"Saya menyatakan bahwa saya adalah wajib pajak yang memiliki hak untuk mengakses informasi yang diminta. Saya bersedia menanggung akibat hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, apabila di kemudian hari saya terbukti bukan pihak yang memiliki hak"

berlaku, apabila di kemudian hari saya terbukti bukan pihak yang memiliki hak" pada badan surel.

Hal yang perlu menjadi perhatian adalah permohonan lupa EFIN harus dikirimkan melalui alamat surel yang sama dengan alamat surel terdaftar pada basis data DJP. Jadi misalnya wajib pajak mendaftarkan email abc@def.com pada saat mendaftar NPWP dan tidak pernah dilakukan perubahan, maka wajib pajak mengirim permohonan dari alamat surel tersebut dan mengisi data alamat surel pada badan surel permohonan. Apabila syarat tersebut belum terpenuhi, maka permohonan dapat ditolak dan wajib pajak diarahkan untuk menggunakan kanal lainnya.

Untuk mengoptimalkan fokus layanan, layanan lupa EFIN melalui akun X/ Twitter @kring_pajak akan ditutup bersamaan dengan mulai berlakunya layanan baru melalui surel lupa.efin@pajak.go.id. Namun, wajib pajak masih dapat mengakses layanan lupa EFIN melalui Live Chat pada situs pajak atau menelepon Kring Pajak 1500200.

Hitung Pajak Makin Mudah, Ayo Segera Laporkan Pajak dan Padankan NIK-NPWP

Kini kita telah menginjak bulan kedua tahun 2024. Tentunya sebagai wajib pajak yang taat, kita tentunya perlu segera melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPH) Tahun Pajak 2023. Wajib pajak orang pribadi harus melaporkan SPT Tahunan paling lambat 31 Maret 2024, dan wajib pajak badan harus menyampaikannya sebelum 30 April 2024.

Wajib pajak orang pribadi karyawan yang sepenuhnya berpenghasilan dari pekerjaannya sebagai pegawai, tentu menunggu-nunggu bukti potong yang disusun oleh bagian keuangan atau kepegawaian. Setelah menerima bukti potong, kita segera dapat melaporkan SPT Tahunan.

Namun, wajib pajak orang pribadi yang melaksanakan pekerjaan bebas atau menjalankan usaha, atau wajib pajak badan, tentu perlu menghitung kewajiban pajaknya dengan upaya tambahan. Inilah pentingnya pemahaman atas ketentuan perpajakan, karena kita menganut *self assessment* atau melaksanakan kewajiban perpajakan secara mandiri, mulai dari pendaftaran, menghitung, memperhitungkan, memotong/memungut, hingga melaporkan pajak sendiri. Hal ini bertolak belakang dengan sistem perpajakan *official assessment* yang segala kewajiban pajak ditetapkan oleh fiskus.

Kalkulator Pajak

Kabar baiknya, DJP senantiasa berinovasi dalam menggelar layanan administrasi perpajakan. Melalui laman landas (*landing page*) <https://kalkulator.pajak.go.id>, DJP telah menyediakan Kalkulator Pajak, sehingga pengunjung dapat menghitung pajaknya dengan lebih gampang. Kalkulator Pajak menyediakan simulasi penghitungan PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Badan, PPN, serta PPhBM.

Penghitungan PPh Pasal 21 yang berkaitan dengan penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama apa pun yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, juga sudah disesuaikan dengan ketentuan terbaru mengenai tarif efektif rata-rata (TER), yang sebelumnya menjadi atensi publik. Hal ini seiring dengan telah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 58/2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi (PP 58/2023), beserta ketentuan turunannya, yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Pribadi.

Buku Elektronik

Selain menyediakan Kalkulator Pajak, DJP juga telah merilis buku elektronik ihwal tata cara pemotongan PPh Pasal 21/26. Buku elektronik tersebut dapat diunduh dengan mengakses tautan <https://pajak.go.id/id/sinopsis-ringkas-dan-unduh-buku-cermat-pemotongan-pph-pasal-2126>. Buku ini juga sudah menampung pembaruan



Kabar baiknya, DJP senantiasa berinovasi dalam menggelar layanan administrasi perpajakan.

ketentuan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 58/2023 dan PMK Nomor 168/2023.

Layanan EFIN Pascapandemi

Tentu dalam melaporkan SPT Tahunan secara daring, kita memerlukan *electronic filing identification number* (EFIN). EFIN merupakan 10 digit nomor identitas untuk melakukan transaksi elektronik atau e-Filing pajak. Berhubung pandemi Covid-19 dinyatakan telah usai dan beralih menjadi endemi, layanan administrasi perpajakan mengalami penyesuaian. Khusus layanan EFIN, terdiri atas layanan aktivasi EFIN dan layanan lupa EFIN.

Wajib pajak dapat memanfaatkan layanan aktivasi EFIN dengan berkunjung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) terdekat. Sementara itu, bagi yang lupa EFIN, para wajib pajak dapat bertandang ke KPP atau KP2KP terdekat, atau memanfaatkan layanan Kring Pajak. Kring Pajak dapat diakses melalui beberapa pilihan, yakni telepon 1500200 atau live chat pajak Tanya Fiska/Fisko (chatbot) di laman www.pajak.go.id. Bagi wajib pajak orang pribadi, selain sarana Kring

Pajak di atas, juga dapat menggunakan aplikasi m-Pajak yang dapat diunduh dari apps store atau mengirimkan email ke alamat lupa.efin@pajak.go.id.

Pemadanan NIK-NPWP

Salah satu terobosan reformasi perpajakan adalah pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dengan batas waktu 30 Juni 2024. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah, yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Dengan adanya pemadanan NIK-NPWP, ke depan layanan administrasi perpajakan akan lebih mudah. Oleh karena itu, mari segera padankan NIK menjadi NPWP. Cara mudah pengecekan apakah NIK sudah padan dengan NPWP yaitu dengan menginput NIK pada saat login di laman <https://djponline.pajak.go.id>. Apabila berhasil masuk ke dalam akun, berarti NIK sudah padan. Oleh karena itu, mari segera padankan NIK menjadi NPWP.

Peringatan Hari Pabean Internasional 2024, Jalin dan Perkuat Kemitraan Dalam Hadapi Tantangan Global

Direktorat Jenderal Bea Cukai menjadi salah satu administrasi kepabeanan yang tergabung dalam *World Customs Organization* (WCO). Setiap tahunnya, Bea Cukai turut memeriahkan peringatan Hari Pabean Internasional atau *International Customs Day* (ICD) yang jatuh pada 26 Januari 2024. Tahun ini tema yang diangkat oleh WCO adalah *Customs Engaging Traditional and New Partner with Purpose*.

Tema ICD 2024 dilatarbelakangi oleh tantangan yang dihadapi oleh administrasi pabean dalam satu dekade terakhir meliputi revolusi teknologi, krisis lingkungan dan kesehatan, serta kompleksitas isu geopolitik yang tidak hanya menuntut respon cepat, tetapi juga pendekatan proaktif oleh

administrasi pabean di seluruh dunia.

Kasubdit Hubungan Masyarakat dan Penyuluhan, Encep Dudi Ginanjar mengungkapkan, “oleh karena itu, tema tersebut diangkat sebagai seruan kepada negara anggota WCO untuk meninjau kembali strategi kemitraan dalam bidang kepabeanan, baik dengan memperdalam kerja sama yang sudah ada, maupun dengan membentuk kemitraan baru di tengah kondisi global yang terus berkembang.”

Dalam amanat yang disampaikan pada upacara peringatan ICD 2024, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Askolani menyatakan dalam menghadapi tantangan global dibutuhkan sinergi dan kolaborasi yang kuat dengan



berbagai entitas. Tujuannya adalah untuk menciptakan solusi yang efektif dan berkelanjutan. Hal ini telah dilakukan Bea Cukai baik di level dalam negeri maupun internasional. Kerja sama tersebut mencakup pengawasan, penegakan hukum dan peningkatan kepatuhan pengguna jasa.

Kolaborasi dan inovasi terus dilakukan Bea Cukai untuk merespons tantangan dan memanfaatkan peluang dalam lanskap perdagangan global yang terus berubah. Sejalan dengan itu Bea Cukai terus menjalin kerja sama melalui berbagai *platform* kolaborasi untuk mewujudkan layanan publik yang lebih efisien, transparan serta pengawasan yang efektif. Selain mendorong kolaborasi dengan pelaku usaha, ke depannya Bea Cukai juga perlu membentuk kerja sama dengan mitra baru, seperti perusahaan dan *platform* teknologi, lembaga keuangan, organisasi nonpemerintah, dan akademisi. "Kemitraan baru ini diharapkan membawa terobosan dan



**Kemitraan baru
ini diharapkan
membawa terobosan
dan solusi inovatif
dalam memfasilitasi
perdagangan,
meningkatkan keamanan
perbatasan, dan
memperkuat ketahanan
rantai pasok global.**

solusi inovatif dalam memfasilitasi perdagangan, meningkatkan keamanan perbatasan, dan memperkuat ketahanan rantai pasok global,” ujar Askolani.

Dalam rangka memperingati HPI, WCO memberikan apresiasi dalam bentuk Piagam Penghargaan (*Certificate of Merit*) kepada individu, tim, atau satuan kerja di lingkungan Bea Cukai, serta pihak eksternal yang telah memberikan kontribusi sesuai dengan tema ICD 2024.

Bea Cukai juga menyelenggarakan webinar bertema “*Navigating the Global Landscape: Customs Forging Sustainable and Resilient Partnership*”. Dalam kesempatan tersebut, Dr. Kunio Mikuriya, *WCO Secretary General*, menjelaskan keterlibatan administrasi Bea Cukai yang semakin luas dalam mengatasi isu-isu global. Bea Cukai sebagai agen perbatasan berperan penting dalam mengatasi tantangan tersebut dan harus bekerja sama dengan administrasi kepabeanan lainnya, organisasi internasional, dan pihak swasta.

Frank Heijmann, perwakilan dari *Netherlands Customs* juga mengungkapkan terkait peran dan tantangan yang dihadapi oleh administrasi pabean saat ini, termasuk bagaimana cara menyeimbangkan peran antara fasilitasi dan pengawasan. Dalam penjelasannya, ia mengungkapkan bahwa manajemen risiko bea cukai berfungsi serta strategi penegakan hukum yang tidak hanya memperkaya pemahaman kita tetapi juga menyoroti pentingnya inovasi dan kolaborasi dalam mengatasi tantangan global.

Rizal Edwin Manangsang, Staf Ahli Bidang Transformasi Digital, Kreativitas, dan Sumber Daya Manusia Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjelaskan bagaimana ekonomi digital diharapkan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah merumuskan strategi pengembangan ekonomi digital hingga 2045 melalui tiga fase: *Prepare* (perbaikan pondasi digital dasar), *Transforms* (percepatan transformasi untuk masyarakat dan bisnis yang cerdas), dan *Lead* (menetapkan standar teknologi inovasi). Strategi tersebut mencakup enam pilar utama: perluasan infrastruktur digital, peningkatan keterampilan SDM, komitmen pada riset, inovasi, dan pengembangan, inklusi finansial, serta dukungan regulasi yang sehat.

Indonesia- Hongkong Mulai Terapkan MRA AEO, Apa Dampaknya?

Bea Cukai mulai mengimplementasikan secara penuh *Mutual Recognition Arrangement on Authorized Economic Operator* (MRA AEO) Indonesia-Hong Kong pada 1 Februari 2024, setelah kedua negara menandatangani kesepakatan tersebut pada Agustus 2022. MRA AEO Indonesia-Hong Kong merupakan kesepakatan pengakuan timbal balik antara administrasi kepabeanan kedua negara tentang program-program AEO, agar dapat diakui dan diterima di tiap-tiap negara.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Encep Dudi Ginanjar, pada Selasa (06/02) mengatakan kesepakatan ini terutama memuat tentang skema pemberian

beberapa fasilitas perdagangan bagi Indonesia. Untuk importir, baik yang berstatus AEO maupun nonAEO, yang akan mengimpor barang berasal dari perusahaan AEO di Hong Kong, akan mendapatkan percepatan proses *customs clearance* pada saat pemberitahuan impor barang BC 2.0 di Indonesia. Lalu, untuk eksportir AEO yang mengeksport barang ke Hong Kong akan mendapatkan percepatan proses *customs clearance*.

Implementasi MRA AEO diharapkan dapat berdampak baik bagi kedua belah pihak. Kesepakatan ini juga menjadi salah satu tanda optimisme hubungan ekonomi bilateral antara Indonesia dan Hong Kong. "Dengan MRA AEO Indonesia-Hongkong, akses pasar internasional bagi pelaku bisnis



di dua negara terutama usaha kecil dan menengah akan semakin mudah. Kami berharap akan terwujud efisiensi waktu dan biaya logistik dan pengakuan status AEO yang baik, kepastian hukum, dan lainnya, sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di kedua negara,” ujar Encep.

Ia juga menegaskan bahwa sebagai penjawat komiten serta tugas dan fungsi *trade facilitator*, Bea Cukai akan terus mengawal implementasi MRA AEO Indonesia-Hongkong. “Hal ini semata untuk mendukung efisiensi biaya logistik dan pertumbuhan ekonomi. Tak luput, kami juga mengapresiasi para pengguna jasa yang mendukung implementasi MRA AEO dengan mematuhi peraturan dalam bidang impor dan ekspor. Bersama, kita wujudkan kerja sama perdagangan yang baik demi perekonomian Indonesia,” tutup Encep.



Kesepakatan ini juga menjadi salah satu tanda optimisme hubungan ekonomi bilateral antara Indonesia dan Hong Kong.

Pembiayaan APBN 2024 untuk Mendukung Transformasi Ekonomi

Perekonomian Indonesia tahun 2023 tetap tumbuh kuat di kisaran 5,05 persen (yoy) di tengah tekanan dan volatilitas global, didukung kinerja APBN 2023 yang bekerja sebagai *shock absorber* dalam meredam dampak gejolak global terhadap ekonomi domestik. Capaian positif perekonomian dan APBN tersebut menjadi modal positif Indonesia dalam menghadapi tantangan yang tidak kalah berat di 2024. Untuk itu, APBN 2024 didesain untuk mendorong reformasi struktural dalam rangka percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi perlu dilakukan reformasi fiskal yang holistik melalui: i) optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha; ii) penguatan

kualitas belanja negara yang efisien, fokus terhadap program prioritas, dan berorientasi pada *output/outcome* (*spending better*); dan iii) pembiayaan yang inovatif, *prudent*, dan *sustainable*.

Guna menjaga momentum dan mempercepat upaya pertumbuhan, menstimulasi perekonomian, serta mengakselerasi pencapaian sasaran pembangunan, pemerintah menempuh kebijakan fiskal ekspansif. Defisit pada APBN dan kebutuhan pembiayaan anggaran merupakan konsekuensi dari kebijakan ini. Arah kebijakan defisit APBN 2024 untuk melanjutkan konsolidasi fiskal dan mendorong peningkatan produktivitas, kesejahteraan masyarakat serta akselerasi transformasi ekonomi, yang defisit APBN 2024 ditetapkan sebesar 2,29 persen PDB. Pembiayaan

anggaran dilaksanakan searah dengan kebijakan defisitnya dan akan dipenuhi dengan menjaga pembiayaan utang dalam batas yang aman dan manageable serta mengoptimalkan pembiayaan non utang.

Kebijakan pembiayaan anggaran secara umum mengarah kepada pembiayaan inovatif dan sustainable, melalui langkah-langkah sebagai berikut: i) fokus pembiayaan untuk mendukung transformasi ekonomi (antara lain infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), energi, konektivitas, kawasan industri, dan kawasan ekonomi); ii) mendorong skema KPBU yang *sustainable* lebih masif; iii) pendalaman pasar keuangan domestik (*financial deepening*); serta (iv) penguatan peran SWF dan SMV, BLU, BUMN, dan *blended finance*, juga penguatan manajemen kas untuk menjaga *fiscal buffer* yang handal dalam rangka penguatan ketahanan fiskal. Secara lebih detail, kebijakan pembiayaan utang diarahkan agar: (1) pengelolaan utang dilakukan secara *prudent* dan fleksibel; (2) efisiensi biaya utang melalui pengembangan dan pendalaman pasar keuangan; serta (3) pinjaman utang yang selektif dalam rangka mendorong penyediaan infrastruktur dan alih teknologi. Sementara itu, kebijakan pembiayaan nonutang dilakukan melalui pembiayaan investasi yang efektif dalam mendukung transformasi ekonomi melalui pemberdayaan BLU, BUMN, SMV, dan SWF, serta optimalisasi pemanfaatan sisa anggaran lebih (SAL) untuk mengantisipasi ketidakpastian. Pemerintah senantiasa menjaga kolaborasi yang solid antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan.

Pengelolaan utang pemerintah dilakukan secara cermat dan hati-hati dengan berpedoman pada strategi yang dibagi berdasar horizon waktu,

yaitu horizon jangka menengah untuk periode 4 tahun (dituangkan dalam Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah) dan horizon waktu 1 tahun (dituangkan dalam Strategi Pembiayaan Tahunan).

Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah (SPUJM) disusun dengan mengacu pada RPJMN atau *Medium Term Budget Framework* (MTBF) dan asumsi makro jangka menengah yang terdiri dari proyeksi nilai tukar dan tingkat bunga, dalam periode jangka menengah. SPUJM ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan untuk memberikan arahan kebijakan kualitatif yang berkenaan dengan kebijakan umum pengelolaan utang, kebijakan yang mengatur Surat Berharga Negara dan Pinjaman dan batas maksimal pemberian jaminan serta penerapan kebijakan lindung nilai (*hedging*). SPUJM juga menetapkan target numerik berupa *trajectory* indikator risiko yang dimonitor dan ditargetkan atas periode cakupan. Sementara, strategi Pembiayaan Tahunan Melalui Utang (SPT) disusun dengan mengacu pada target pembiayaan utang yang ditetapkan dalam APBN dan target risiko utang dalam Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah. SPT ditetapkan



Kebijakan pembiayaan anggaran secara umum mengarah kepada pembiayaan inovatif dan sustainable.

melalui Keputusan Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan berisi arahan strategi operasional pembiayaan utang dalam satu tahun dan rencana komposisi penerbitan/pengadaan utang baru. Kedua dokumen ini dapat diakses pada website resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan melalui alamat <https://www.djppr.kemenkeu.go.id/strategipengelolaanutang>.

Kebutuhan pembiayaan utang neto pada APBN 2024 diperkirakan sebesar Rp648,09 triliun, terdiri dari penerbitan SBN sebesar Rp666,45 T dan pinjaman sebesar negatif Rp18,36 T. Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan tersebut, memberikan fleksibilitas, dan mencapai komposisi yang optimal, pemerintah melakukan diversifikasi portofolio baik dari segi instrumen utang, suku bunga, mata uang, dan tenor. Untuk tahun 2024, Pemerintah akan memprioritaskan penerbitan utang domestik dengan proporsi sekitar 75–85 persen, dan sisanya berupa penerbitan utang valas sekitar 15–25 persen sebagai pelengkap dan mitigasi *crowding out effect*.

Penerbitan SBN akan dilakukan secara hati-hati dan oportunistik. Pemilihan instrumen SBN, penyesuaian target dan waktu lelang SBN serta penerbitan SBN valas akan disesuaikan dengan dinamika pasar. Penerbitan SBN di tahun 2024 direncanakan sekitar 62–70 persen berupa SUN dan 30–38 persen dalam SBSN. Penerbitan SBN di pasar domestik utamanya akan dilakukan melalui lelang SUN dan SBSN bergantian masing-masing 24 kali. Selain itu, SBN Ritel rencananya akan diterbitkan sebanyak 8 (delapan) kali, yaitu ORIO25, SRO20, ST012, SBR013, SWR005, SRO21, ORIO26, dan ST013. Yang menarik, porsi penerbitan SBN Ritel 2024 ditargetkan sebesar 10–15 persen, meningkat jauh dibandingkan target pada 2020

sebesar 3–6 persen. Hal ini menunjukkan upaya dan komitmen pemerintah untuk terus mendorong partisipasi masyarakat dan kemandirian pembiayaan. Pemerintah akan mengoptimalikan penerbitan SBN Ritel dalam rangka pengembangan pasar, serta sebagai bagian dari perluasan basis investor domestik. Sementara, penerbitan SBN Valas direncanakan berupa *Global Bonds*, *Global Sukuk*, dan *Samurai Bond*.

Pembiayaan melalui Pinjaman pemerintah akan dioptimalkan untuk mendukung *recovery* ekonomi dengan menjaga efisiensi risk and *cost of borrowing*. Pinjaman tunai akan dimanfaatkan secara fleksibel untuk membiayai defisit APBN secara umum dan pengelolaan portofolio utang. Sementara pinjaman kegiatan dimanfaatkan untuk kegiatan produktif antara lain: mendukung prioritas nasional, memberi nilai tambah proses perencanaan dan penyiapan kegiatan, dan mendukung upaya alih teknologi, serta untuk mendorong perkembangan industri dalam negeri.

Tak hanya dalam hal pengadaan utang baru, pemerintah juga melakukan pengelolaan atas *outstanding* utang untuk mencapai portofolio utang yang optimal. Strategi untuk menjaga portofolio utang yang optimal antara lain juga dilakukan melalui *Debt Switching* dan *Cash Buy Back* yang dilakukan untuk memperbaiki portofolio utang dan menambah likuiditas SBN, serta Konversi Pinjaman yang berperan untuk menurunkan risiko nilai tukar. Hal tersebut dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan biaya dan risiko yang paling efisien.

Halaman Ini Dikосongkan

